

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
ORGANISASI KEAGAMAAN
(Studi Kasus Tunggal pada Masjid Rahmat Surabaya)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI**



DISUSUN OLEH:

YOGA BATRIAWAN SOTYA

NIM : 041511333026

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN
RELIGIOUS ORGANIZATIONS
(Single Case Study at Masjid Rahmat Surabaya)**

**THESIS
SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF ACCOUNTING**



BY:

YOGA BATRIAWAN SOTYA

NIM : 041511333026

**ACCOUNTING STUDY PROGRAM
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK SIDANG SKRIPSI

Surabaya, 13 Agustus 2022

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tjiptohadi Sawarjuwono', written over a horizontal line.

Prof. Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono,

M.Ec.,Ph.D.,Ak.NIP. 195309071982031001

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
KEAGAMAAN (STUDI KASUS TUNGGAL PADA MASJID RAHMAT
SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH

YOGA BATRIAWAN SOTYA

NIM: 041511333026

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



Prof. Drs. TJIPTOHADI SAWARJUWONO, M.Ec., Ph.D., Ak. Tanggal 17 Oktober 2022

NIP. 195309071982031001

KOORDINATOR PROGRAM STUDI,



ALFIYATUL QOMARIYAH, S.Ak., MBA., Ph.D.

Tanggal 17 Oktober 2022

NIP. 198404202008121005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Yoga Batriawan Sotya, 041511333026), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 23 Agustus 2022



Yoga Batriawan Sotya

NIM: 041511333026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Mengungkap Praktik dan Pemahaman Laporan Keuangan dari Perspektif Kecerdasan Spiritual pada Petambak”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Universitas Airlangga.

Tak lupa penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bentuk dukungan dan pendidikan selama menjalani perkuliahan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bambang Suseno dan Tri Wartini yang senantiasa memberikan banyak bimbingan pengetahuan dan karakter kepada penulis sejak kecil serta selalu memberikan dukungan dalam bentuk doa, motivasi dan finansial kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA., CMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
3. Ibu Alfiyatul Qomariyah S.Ak., M.BA., Ph.D., selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Universitas Airlangga.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan banyak bimbingan selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs., M.Ec., Ph.D., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan pada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Jajaran dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang memperkenalkan kemegahan dan keluhuran ilmu akuntansi pada penulis selama di perkuliahan.
7. Seluruh staf Dekanat dan Departemen Akuntansi yang telah membentuk sistem birokrasi yang efektif dan efisien serta ramah mahasiswa sehingga memudahkan masa perkuliahan penulis.
8. Bapak Haji Riduwan Aziz S. Ag., Bapak Besar Soeripno S.H., Bapak Priadi dan para jamaah serta takmir masjid Rahmat Surabaya selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berdiskusi terkait penelitian ini.

9. Mas Yudhi Mahendra Hudasurya yang telah membantu penulis dalam menentukan topik penelitian dan membimbing penulis saat prapenelitian.
10. Shihab, Helmy dan Hashfi yang selalu memotivasi dan mendampingi, dan memberi masukan pada penulis sejak awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
11. Reza, Gymnastiar, teman-teman BWS AKS1 15 dan para adik tingkat penulis yang selalu menjadi pengingat dan penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan penelitian.
12. Teman-teman PT IRS Holding Company, Mas Ijad, Mas Lujo, Mas Aji, Mas Idang, Sasa Aprilia dan Sasa K. yang telah membentuk suasana produktif dan suportif di kantor sehingga memudahkan penulis menyusun penelitian dengan lebih efisien.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis sendiri menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis menerima berbagai masukan saran dan kritik agar penelitian skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta memberikan sumbangan referensi ilmu pengetahuan serta menjadi inspirasi penelitian tentang akuntansi. Sekian, yang dapat penulis sampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 Agustus 2022



Yoga Batriawan Sotya

NIM. 041511333026

ABSTRAK

Akuntabilitas tidak hanya diperlukan pada pelaporan keuangan masjid belaka. Akuntabilitas masjid harus dipahami dengan lebih mendalam sebab takmir masjid bertanggungjawab tidak hanya pada jamaah dan donatur masjid tersebut melainkan juga Allah. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bentuk akuntabilitas yang diterapkan oleh takmir masjid berdasarkan dimensi dan mekanisme akuntabilitas disertai dengan pemaknaan implementasi sifat rasul guna memberikan gambaran yang menyeluruh terkait akuntabilitas masjid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-eksplanatoris pada subjek tunggal yaitu Masjid Rahmat Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Masjid Rahmat belum berjalan baik jika ditinjau dari dimensi, mekanisme akuntabilitas dan penerapan sifat rasul. Akuntabilitas pada dimensi akuntabilitas spiritual dan hukum telah berjalan dengan cukup baik namun pada dimensi akuntabilitas program, proses dan keuangan masih harus dievaluasi. Beberapa hal yang masih harus dilakukan takmir untuk meningkatkan akuntabilitas masjid adalah melakukan penyusunan program dengan lebih tertata, membentuk standar operasional yang lebih jelas, membuat penganggaran dan melaporkan realisasinya dengan lebih tepat waktu dan transparan, serta memberikan pelatihan atau pendampingan pada takmir terkait upaya peningkatan kompetensi keuangan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dimensi Akuntabilitas, Implementasi Sifat Rasul, Mekanisme Akuntabilitas, Masjid.

ABSTRACT

Accountability is not only required for the financial reporting of the mosque alone. The accountability of the mosque must be understood more deeply because the takmirs of the mosque is not only responsible to jamaah and donors of the mosque but also to Allah. This study seeks to reveal the form of accountability applied by the takmirs based on the dimensions and mechanisms of accountability accompanied by the implementation of the Prophet's characters in order to provide a comprehensive picture of the mosque's accountability. This study uses a qualitative method with a descriptive-explanatory case study approach on a single subject which is Rahmat Mosque, Surabaya. The data was collected through observation, documentation, and in-depth interviews. The results of this study indicates that the accountability of Rahmat Mosque has not gone well when viewed from the dimensions and mechanisms of accountability and application of the Prophet's characters. Accountability on the dimensions of spiritual and legal accountability has been running quite well, but on the dimensions of program, process and financial accountability still require to be evaluated. Some of the things that the takmir still needs to do to improve the mosque's accountability are to make programs to be more organized, establish clearer operational standards, make budgets and report their realizations to be more timely and transparently, and provide training or assistance to takmirs related to efforts to increase financial competency.

Keyword: Accountability, Dimensions of Accountability, Implementation of Prophet's Characters, Mechanisms of Accountability, Mosque.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TITLE.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Ringkasan Metode Penelitian.....	4
1.5 Kontribusi Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	6
2.1.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	7
2.1.3 Dimensi, Mekanisme Akuntabilitas serta Implementasi Sifat Rasul	8
2.2 Kerangka Konseptual.....	14
BAB 3 METODE PENELITIAN	16

3.1	Pendekatan Penelitian	16
3.2	Teknik Pengumpulan Data	16
3.3	Teknik Analisis dan Interpretasi Data	19
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		21
4.1	Gambaran Umum Penelitian	21
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	21
4.2.1	Akuntabilitas Spiritual Masjid Rahmat.....	21
4.2.2	Akuntabilitas Hukum Masjid Rahmat	24
4.2.3	Akuntabilitas Program Masjid Rahmat.....	27
4.2.4	Akuntabilitas Proses Masjid Rahmat.....	30
4.2.5	Akuntabilitas Keuangan Masjid Rahmat	33
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		43
5.1	Kesimpulan.....	43
5.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		46
DAFTAR LAMPIRAN.....		49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan Penghasilan Komprehensif Januari – Mei 2022	36
Gambar 4.2 Laporan Arus Kas Bagian Aktivitas Operasi Masjid Rahmat Januari – Mei	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara	48
Lampiran 2: Laporan Keuangan / Pembukuan oleh Pak Priadi	66
Lampiran 3: Laporan Keuangan bagian Neraca	67
Lampiran 4: Keputusan Rapat Terkait Susunan Pembina dan Pengurus Masjid Rahmat	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan poin utama dalam meninjau kualitas kinerja pengelolaan keuangan suatu entitas. Akuntabilitas dulu hanya dituntut pada entitas yang berorientasi pada laba (*profit-oriented*) tetapi kini entitas non-laba seperti pada pemerintahan, yayasan, serta organisasi keagamaan juga dituntut memiliki akuntabilitas (Bastian, 2010; Fikri dkk, 2010). Akuntabilitas merupakan proses di mana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya (Huda dkk., 2014). Tidak dipungkiri tuntutan mengenai akuntabilitas pada entitas nonlaba terutama organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk respons masyarakat pada fenomena kebijakan masjid sering disorot media maupun akademisi. Salah satunya yaitu Masjid Jogokaryan, Yogyakarta dengan kebijakan “saldo nolnya” (Riani, 2019). Masyarakat semakin sadar akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, terutama pada entitas nonlaba seperti masjid

Tantangan utama dalam pengelolaan masjid saat ini ialah memastikan berlakunya praktik *good governance* oleh masjid dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*) dan bersih secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat, merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan (Setyawan, 2015). Bentuk perasaan seperti ikut memiliki yang rendah serta tidak adanya keinginan untuk meraih keuntungan pada kebanyakan organisasi keagamaan menyebabkan organisasi ini sangat bergantung pada sumber daya eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya (Mohammed, 2014). Lemahnya sistem pengendalian internal semakin meningkatkan risiko dalam

pengelolaan masjid yang mengakibatkan rendahnya kualitas praktik akuntansi keuangan masjid (Adil dkk., 2013).

Manajemen dan pengawasan masjid yang tepat sangat penting untuk memudahkan pelayanan masjid kepada masyarakat (Al-Dawarni, 2007). Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam yang juga merupakan salah satu entitas nonlaba, tentu lazim untuk selalu berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik dan benar. Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik pada masjid berkaitan erat dengan kepercayaan jamaah dan kualitas pelayanan masjid pada jamaah. Dengan tingginya kepercayaan jamaah pada pengurus masjid, masjid dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, baik melalui pelayanan yang bersifat keagamaan serta pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Siskawati dkk., 2015). Pada ujungnya, masjid dapat kembali menjadi pusat berkembangnya peradaban seperti ketika zaman Rasulullah SAW.

Tantangan penerapan akuntansi oleh takmir masjid masih menjadi persoalan utama hingga saat ini. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi pada masjid masih belum optimal atau belum sesuai standar dari Ikatan Akuntan Indonesia. Mufidah (2018) dan Sitompul dkk. (2016) mengungkapkan proses akuntabilitas pada beberapa masjid masih bersifat sangat sederhana dan hanya dengan format penerimaan serta pengeluaran kas saja. Namun temuan yang sedikit berbeda diungkapkan Fanani (2020). Dalam penelitiannya, menemukan bahwa telah terdapat pengembangan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen pada masjid yang diteliti. Temuan lain yang diungkapkan Fanani (2020) ialah terdapat laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK 45 namun pelaporan keuangan ini hanya dilaporkan pada bagian yayasan sedangkan, pelaporan keuangan kepada jamaah hanya sebatas pengumuman sederhana secara lisan dan ditempel di papan informasi. Penggunaan PSAK 45 pada pelaporan keuangan organisasi nonlaba kini tidak lagi relevan sebab telah ditetapkannya ISAK 35 pada tanggal 1 Januari 2020. Penetapan ISAK 35 berimplikasi pada beberapa perubahan pada laporan keuangan entitas nonlaba sebagai contoh perubahan istilah entitas nirlaba, yang berarti tidak boleh sama sekali memiliki laba, menjadi entitas nonlaba, yang memperbolehkan adanya

keuntungan namun bukan merupakan tujuan utama dari entitas tersebut. Selain itu, terdapat perubahan pada laporan aktivitas menjadi laporan penghasilan komprehensif.

Keadaan ini tentu tidak diharapkan untuk terus terjadi. Rendahnya akuntabilitas yang terdapat pada masjid dapat meningkatkan potensi terjadinya kecurangan terhadap pengelolaan dana jamaah baik yang disengaja oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maupun tidak disengaja sebab pemahaman akuntabilitas yang kurang oleh takmir. Andarsari (2016) berpendapat bahwa kelemahan ini dapat mengakibatkan kasus pencurian aset masjid. Penggelapan dana masjid (Faizal, 2018; Purnamasari, 2020) serta korupsi dana hibah Masjid Agung Palopo (Padmasari, 2018) merupakan beberapa kasus yang diakibatkan oleh lemahnya akuntabilitas masjid.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti berfokus pada satu masjid yaitu Masjid Rahmat yang bertipologi yayasan. Hal ini dikarenakan pada beberapa penelitian sebelumnya berfokus akuntabilitas pada masjid bertipologi masjid pemerintah. Perbedaan tipologi masjid akan menyebabkan perbedaan pada mekanisme akuntabilitas yang digunakan juga (Fitria, 2017). Kemudian subyek masjid yang akan diteliti memiliki corak akulturasi budaya yang unik dan membedakannya dengan masjid yayasan lain. Peneliti memilih Masjid Rahmat Surabaya sebagai subyek penelitian sebab masjid tersebut merupakan masjid yang sangat dikenal baik dalam segi kemanfaatan bagi umat serta dalam segi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid. Selain fasilitas ibadah, masjid-masjid tersebut memiliki beberapa fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat antara lain lembaga pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama, serta program penguatan ekonomi umat berupa bantuan beras yang dapat diambil setiap hari kamis.

1.2 Rumusan Masalah

Akuntabilitas tidak hanya diperlukan pada pelaporan keuangan organisasi belaka. Akuntabilitas masjid harus dipahami dengan lebih mendalam sebab takmir masjid bertanggungjawab tidak hanya pada jamaah dan donatur masjid tersebut

melainkan juga Allah. Pemahaman konsep akuntabilitas masjid ini dapat diwujudkan dalam beberapa dimensi akuntabilitas yaitu dimensi hukum, spiritual, proses, program, serta keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan bentuk akuntabilitas yang diterapkan oleh takmir masjid berdasarkan dimensi dan mekanisme akuntabilitas disertai dengan pemaknaan implementasi sifat rasul guna memberikan gambaran yang menyeluruh terkait akuntabilitas masjid. Selanjutnya, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut “Bagaimana implementasi akuntabilitas yang diterapkan pada Masjid Rahmat Surabaya melalui peninjauan dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta penerapan sifat rasul?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberi rekomendasi atas akuntabilitas masjid. Hal ini dilakukan dengan cara memetakan implementasi akuntabilitas yang dilakukan oleh takmir Masjid Rahmat Surabaya berdasarkan dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta menyelaraskannya dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dan ajaran agama melalui nilai-nilai sifat rasul yang menjadi pedoman perilaku sebagai entitas keagamaan. Pada akhirnya, Masjid Rahmat Surabaya tidak hanya lebih akuntabel secara keuangan namun juga dapat menyebar manfaat yang lebih optimal bagi jamaah dan masyarakat sekitar.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang didasarkan pada buku karya Basuki (2016). Penelitian ini berjenis *holistic single case study* yang berfokus pada satu kasus dengan hanya satu unit analisis yaitu Akuntabilitas Masjid. Secara umum, pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diproses dengan triangulasi untuk diuji kualitas validitas dan reliabilitas data tersebut. Kemudian data akan dianalisis dengan

metode *pattern matching* yaitu dengan membandingkan temuan dengan teori yang relevan (dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta implementasi sifat rasul) dan proposisi yang telah ditetapkan. Setelah itu, peneliti menjelaskan kembali hasil perbandingan tersebut secara logis. Pada akhir penelitian, peneliti melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan dari proses penelitian serta memberikan rekomendasi terhadap akuntabilitas Masjid Rahmat Surabaya sesuai teori dan kapasitas peneliti.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan pandangan baru mengenai akuntabilitas organisasi nonlaba terkhusus pada masjid bertipologi yayasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi beberapa cara pengamatan pada dimensi-dimensi akuntabilitas yang dilengkapi dengan penjelasan melalui lima mekanisme akuntabilitas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Harapan peneliti untuk penelitian ini juga agar dapat menjadi dasar pertimbangan penentuan kebijakan masjid yang lebih akuntabel.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang landasan yang berdasarkan literatur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian yaitu bagaimana implementasi akuntabilitas yang diterapkan pada Masjid Rahmat Surabaya melalui peninjauan dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta penerapan sifat rasul. Landasan teori yang bersumber pada konsep akuntabilitas nonlaba dan akuntabilitas dalam perspektif Islam. Pada bagian setelahnya, peneliti mengajukan beberapa proposisi yang digunakan untuk membahas studi kasus dengan memfokuskan akuntabilitas masjid Rahmat yang dibahas melalui dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta implementasi sifat rasul. Peneliti menggunakan lima dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Qolbi (2015) serta disempurnakan dengan lima mekanisme akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ebrahim (2003) dan implementasi empat sifat Rasul dalam menyusun proposisi.

Terakhir adalah bagian kerangka konseptual yang menjadi pedoman peneliti dalam membahas hasil penelitian. Konsep yang menjadi dasar penelitian ini adalah akuntabilitas masjid Rahmat Surabaya. Konsep tersebut yang dijelaskan melalui dimensi-dimensi akuntabilitas yang dilengkapi dengan implementasi sifat Rasul dan mekanisme akuntabilitas sehingga pada akhirnya terwujud bentuk akuntabilitas Masjid Rahmat.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas atau “*accountability*” berasal dari dua kata, yaitu “*account*” yang berarti rekening, laporan atau catatan dan “*ability*” yang berarti kemampuan. Berdasarkan hal tersebut, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menyediakan catatan atau laporan yang dapat dipertanggungjawabkan (Kholmi, 2012). Pemaknaan akuntabilitas dalam penelitian ini akan didasarkan pada akuntabilitas publik yaitu sebagai kewajiban memberikan

pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/organisasi kepada pihak yang memiliki hak meminta dan menerima keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2005; Adisasmita, 2011:89).

Tuntutan mengenai akuntabilitas sektor publik selaras dengan meningkatnya tuntutan implementasi praktik *good governance*. Hal ini sejalan dengan fungsi akuntabilitas yaitu instrumen pengendalian (*check and balance*) terhadap program – program organisasi publik (Qolbi, 2015). Lebih lanjut, Trow (1996) menjelaskan fungsi akuntabilitas yaitu sebagai pembatas kewenangan dan instrumen regulasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja suatu organisasi.

2.1.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Menafakuri lebih dalam terkait syariat Islam, terminologi *accountability* (akuntabilitas) dari kata dasar *account* adalah *hisab* (perhitungan). Kata *hisab*, dalam Al-Qur'an, diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda. Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban muhasabah kepada Allah SWT yang dapat dimaknai dengan menghitung-hitung amal perbuatan serta terus mengevaluasi diri yang dilakukan seorang hamba sebagai bentuk ketaatan pada Tuhannya (Askary & Clarke, 1997). Selain itu, hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya di akhirat nanti.

Akuntabilitas merupakan sebagian dari implementasi amanah dimana setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Hukum menjaga amanah dalam Islam adalah wajib dan Allah SWT melarang setiap orang untuk bertindak khianat atas amanah yang telah diberikan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al – Anfal ayat 27 yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا ۚ أَمُنُوا الَّذِينَ أَتَيْهَا يَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ibnu Katsir dalam *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Abdullah, 2009) menekankan bahwa melanggar amanah berarti meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan kemaksiatan serta salah satu dosa kecil dan dosa besar yang berdampak terhadap diri sendiri dan orang lain. Peneliti menyimpulkan bahwa

proses akuntabilitas sebagai bagian dalam konsep menjaga amanah adalah hal wajib bagi seluruh umat Islam terutama takmir sebagai pihak yang mendapat amanah mengelola masjid.

Akuntabilitas dalam Islam adalah bentuk pengilhaman nilai-nilai keislaman melalui pengamatan kuasa Allah dengan pancaindra serta pengalaman spiritual yang dituangkan dalam pertanggungjawaban atas peran dan amanah yang diemban manusia. Oleh sebab itu, sebagai salah satu pertanggungjawaban atas perannya di dunia, manusia dalam bermuamalah dengan manusia lainnya diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara benar, adil, jelas, dan jujur sebagai mana telah diatur pada Q.S. Al – Baqarah ayat 282. Quthb (2000) dalam tafsir *Fi Zhilalil-Qur'an* mengungkapkan bahwa ayat tersebut mengatur mengenai pencatatan ketika bermuamalah secara nontunai. Shihab (2011) dalam *Tafsir Al Mishbah* menekankan bahwa pencatatan harus dilakukan dengan adil dan benar, tidak menyalahi hukum Allah dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

2.1.3 Dimensi, Mekanisme Akuntabilitas serta Implementasi Sifat Rasul

2.1.3.1 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas bukan hanya mengenai pelaporan keuangan saja. Akuntabilitas harus dipahami secara utuh dengan kembali mendalami dan mempelajari peran manusia sebagai hamba dan *khalifatullah*. Dengan kembali memahami perannya, manusia dapat mengerti bahwa manusia tidak hanya bertanggungjawab pada organisasinya dan masyarakat sekitar tetapi juga kepada Allah sebagai Tuhan yang memberikan amanah untuk hidup di dunia.

Takmir sebagai pengelola yang diberikan amanah masyarakat maupun organisasi dapat lebih mudah memahami konsep akuntabilitas dengan memahami dimensi-dimensi akuntabilitas, serta menerapkan empat pilar sifat rasul dalam menjalankan amanahnya. Prasetyo dalam Ruknuddin (2016) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan harus memuat empat sifat Rasul agar organisasi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal. Jika hal tersebut dijalankan dengan baik maka permasalahan akuntabilitas masjid seperti laporan keuangan yang masih sederhana hingga terjadinya *fraud* dapat diselesaikan

dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai lima dimensi akuntabilitas (Qolbi; 2015), yakni:

1. Akuntabilitas Spiritual

Akuntabilitas spiritual berfokus pada manusia sebagai hamba yang diberikan amanah oleh Allah, menjalankan peran dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam mengelola organisasi. Wujud akuntabilitas spiritual selaras dengan tujuan diciptakannya manusia sebagaimana dalam firman Allah pada surat *Adz-Dzariyat* ayat 56 yang ditafsirkan Ibnu Katsir dalam *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Abdullah, 2009) tentang kewajiban manusia untuk menyadari perannya sebagai hamba Allah. Hal ini merefleksikan bahwa setiap gerak-gerik, tindakan, bahkan buah pikiran manusia adalah harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Lebih lanjut, Pandini (2013:4) mengungkapkan bahwa akuntabilitas spiritual identik dengan akuntabilitas kejujuran yang menjelaskan bahwa Allah selalu melakukan pengawasan terhadap segala perilaku kita.

2. Akuntabilitas hukum (*Accountability for legality*)

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum dalam pelayanan publik diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 terkait pelayanan publik yaitu seluruh mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada ketentuan yang mengaturnya. Silvia & Ansar (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas hukum merupakan suatu jaminan mengenai adanya peraturan terkait dengan supremasi hukum atau peraturan lain dalam organisasi. Dalam penelitian ini, akuntabilitas hukum didasarkan pada Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor KEP/D/101/'78 dan Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, Sehat (Fajriah, 2020) dalam pengelolaan dan transparansi masjid.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi program. Hal tersebut terkait dengan pencapaian tujuan entitas publik yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang efisien. Selain itu, Silvia dan Ansar (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas program juga berkaitan dengan bagaimana organisasi melahirkan program yang bermutu dan selaras dengan strategi pencapaian visi – misi organisasi.

4. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang diterapkan entitas publik dalam menjalankan fungsinya. Hal ini meliputi kualitas sistem informasi, sistem pendelegasian wewenang dan standar operasional, serta aksesibilitas dan kecukupan informasi (Pandini, 2013). Ellwood dalam Mardiasmo (2009:21) menjelaskan bahwa akuntabilitas proses tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

5. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan pada organisasi publik berkaitan dengan penggunaan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien dan efektif serta tidak ada kebocoran dana dan korupsi. Implementasi akuntabilitas keuangan dalam organisasi publik yaitu kewajiban membuat dan mengungkapkan laporan keuangan sesuai peraturan yang dianut organisasi tersebut (Pandini, 2013).

2.1.3.2 Mekanisme Akuntabilitas

Ebrahim (2003:15) mengungkapkan lima mekanisme akuntabilitas dalam organisasi nonlaba. Hal tersebut terdiri dari dua instrumen dan tiga proses sebagai berikut:

1. Laporan Pengungkapan (*Disclosure Statements and Reports*)

Laporan pengungkapan merupakan instrumen akuntabilitas yang berisi informasi terkait manajemen dan laporan keuangan organisasi pada periode tertentu yang dilengkapi catatan. Fungsi dari laporan ini adalah sebagai bahan

pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak berkepentingan. Oleh sebab itu, pembuatan laporan pengungkapan menjadi salah satu kewajiban takmir dalam rangka peningkatan akuntabilitas masjid. Pulu, dkk. (2015:98) mengungkapkan beberapa informasi minimum yang wajib dipublikasi antara lain AD/ART, sejarah organisasi, visi dan misi, struktur organisasi dan keanggotaan, laporan kegiatan, laporan keuangan tahunan serta hasil audit (jika ada).

2. Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Evaluasi dan penilaian kinerja bermanfaat untuk memahami dampak atas program kerja yang dijalankan oleh organisasi serta sebagai solusi dalam perbaikan dan peningkatan mutu dan kinerja organisasi. Evaluasi harus dilakukan baik secara internal maupun eksternal serta harus mempertimbangkan aspek tertentu. Evaluasi internal dilakukan dengan melakukan perbandingan pada dampak program kerja dengan target awal program tersebut dibuat dari sudut pandang internal organisasi sedangkan evaluasi eksternal lebih menekankan pada respons pihak eksternal terhadap suatu program.

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah proses untuk mencapai akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat serta pihak berkepentingan guna mencapai tujuan organisasi. Keterlibatan masyarakat dapat difasilitasi dengan mengundang masyarakat mengikuti rapat penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi maupun melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun kedekatan dan rasa ikut memiliki partisipan.

4. Regulasi Internal (*Self-regulation*)

Regulasi internal (*self-regulation*) merupakan upaya organisasi dalam membentuk standar atau pedoman kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja guna mencapai tujuan organisasi. Regulasi internal juga dapat digunakan memenuhi kecukupan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk kepatuhan hukum pada

pemerintah. Regulasi internal biasanya mempertimbangkan regulasi pemerintah dan komunitas organisasi sejenis. Beberapa komunitas atau jaringan kerja sama organisasi sejenis yang menghubungkan antar takmir dalam proses *self-regulation mechanism* (penyusunan regulasi internal bersama) antara lain seperti Dewan Masjid Indonesia, Sahabat Masjid, Forum Konferensi Masjid Indonesia, Forkommas (Forum Komunikasi Masjid Masjid Surabaya) dan jaringan-jaringan sejenis lainnya.

5. Audit Sosial (*Social Audit*)

Mekanisme akuntabilitas yang terakhir adalah audit sosial (*social auditing*) yang mengacu pada sebuah proses penilaian dan pelaporan kinerja sosial dan perilaku etis organisasi, terutama melalui dialog pemangku kepentingan. Bukan hanya sebatas evaluasi, audit sosial merupakan proses kompleks yang mengintegrasikan elemen mekanisme akuntabilitas yang lain (pelaporan, evaluasi, partisipasi dan regulasi internal). Audit sosial merupakan cara untuk mengukur penghayatan dan pengimplementasian nilai – nilai organisasi. Selain itu, penghayatan terkait empat sifat Rasul juga tidak kalah penting dalam audit sosial. Hal tersebut mengingat bahwa masjid merupakan organisasi yang berlandaskan nilai Islam.

2.1.3.3 Implementasi Sifat Rasul

Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari Islam. Hal ini tercermin dalam pribadi Rasulullah yang merupakan *uswatun hasanah* atau contoh yang terbaik. Dalam akuntansi, dikenal proses pencatatan yang jujur dan dilakukan orang yang kompeten serta dapat dipercaya sehingga terbentuklah laporan keuangan yang transparan dan reliabel. Lebih dalam, Prasetyo (2003) dalam penelitiannya berpendapat bahwa akuntabilitas suatu organisasi harus dilengkapi dengan implementasi empat pilar sifat rasul agar lebih akuntabel dan dapat memenuhi kaidah pelaporan keuangan. Empat pilar sifat rasul tersebut antara lain: *Ash-shiddiq*, yang berarti benar dan jujur, *Al-Amanah*, yang berarti terpercaya, *At-tabligh*, yang berarti menyampaikan, serta *Al-fathanah*, yang berarti cerdas.

Shiddiq atau kejujuran merupakan kesesuaian antara ucapan, keyakinan dan perbuatan serta berlandaskan pada ajaran Islam (Hafidhuddin & Tanjung, 2003:72). Dalam akuntansi, *shiddiq* berkaitan erat dengan integritas yang juga merupakan elemen penting dalam kode etik akuntan di Indonesia (Fanani, 2020). Prinsip ini mengharuskan takmir untuk bersifat jujur dan tidak menyembunyikan fakta dalam hubungan profesional. Dalam implementasinya, takmir dihimbau untuk melaporkan keuangan sesuai kondisi yang ada, tanpa rekayasa dan manipulasi. Berdasarkan teori di atas, peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut:

Proposisi 1: Penghayatan nilai-nilai keagamaan dan sifat *shiddiq* akan membentuk lingkungan organisasi masjid yang lebih jujur dan meningkatkan akuntabilitas spiritual.

Amanah dapat dipahami sebagai bentuk profesionalisme kerja. Hamzah (1985:98) menjelaskan bahwa amanah merupakan sifat dan sikap yang tulus hati dalam melakukan sesuatu yang telah dipercayakan baik berupa benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Dalam implementasinya, takmir diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengelola masjid sesuai ketentuan pemerintah dan standar yang berlaku dengan sebaik mungkin. Berdasarkan teori di atas, peneliti mengajukan beberapa proposisi sebagai berikut:

Proposisi 2: Penerapan sifat amanah diterapkan takmir dalam pemenuhan kepatuhan hukum negara dan adanya regulasi internal dapat meningkatkan akuntabilitas masjid pada dimensi hukum

Proposisi 3: Penerapan sifat amanah diterapkan takmir dalam pengungkapan pertanggungjawaban atas pelayanan yang diberikan pada jamaah dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan akuntabilitas proses masjid serta membentuk lingkungan organisasi masjid yang berintegritas.

Proposisi 4: Penerapan sifat amanah pada pengelolaan masjid dapat diwujudkan dengan secara proaktif melibatkan jamaah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan masjid sehingga terjalin

hubungan harmonis antara takmir dan jamaah serta dapat memacu peningkatan akuntabilitas program masjid.

Tabligh berkaitan dengan proses penyampaian informasi yang optimal dan pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagai mitra organisasi. Penerapan *tabligh* juga meliputi aksesibilitas dan reliabilitas informasi, serta pembentukan sistem informasi akuntansi dan manajemen masjid. Implementasi *tabligh* mendorong terciptanya transparansi informasi baik keuangan maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat. Berdasarkan teori di atas, peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut:

Proposisi 5: Penerapan sifat *tabligh* melalui transparansi informasi dan pembentukan sistem informasi akuntansi dan manajemen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait akuntabilitas masjid dan meningkatkan akuntabilitas Proses masjid.

Fathanah atau kecerdasan merupakan perilaku untuk memaksimalkan potensi akal yang dikaruniakan Allah pada manusia. Kecerdasan dapat juga diartikan sebagai kompetensi dan kreativitas. Dalam implementasinya, takmir dianjurkan untuk terus meningkatkan kompetensi sesuai bidang yang diamanahkan padanya serta kreatif dan adaptif dalam menyikapi perubahan zaman. Berdasarkan teori di atas, peneliti mengajukan beberapa proposisi sebagai berikut:

Proposisi 6: Penerapan sifat *fathanah* melalui pembinaan kreativitas terkait pengelolaan organisasi akan membentuk lingkungan organisasi masjid yang inovatif dan adaptif serta meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas program masjid.

Proposisi 7: Penerapan sifat *fathanah* melalui pembinaan kompetensi takmir terkait pengelolaan organisasi dan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan masjid.

2.2 Kerangka Konseptual

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang penting baik bagi organisasi komersial maupun organisasi nonlaba. Masjid sebagai salah satu organisasi nonlaba dibidang keagamaan juga memiliki kewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas

untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola masjid mayoritas berasal dari masyarakat dalam bentuk infak, sedekah dan zakat. Penelitian ini akan fokus terhadap praktik akuntabilitas yang ada pada Masjid Rahmat Surabaya. Peneliti menggunakan lima dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Randa (2011) meliputi akuntabilitas spiritual, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas keuangan. Kelima dimensi akuntabilitas tersebut akan dikaitkan dengan implementasi sifat Rasul yaitu *shiddiq*, *tabligh*, amanah dan *fathonah*. Selain itu, dimensi akuntabilitas tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme akuntabilitas. Ebrahim (2003) menjelaskan lima mekanisme yang terdiri dari dua alat yakni (1) laporan pengungkapan (*Disclosure Statements and reports*), (2) evaluasi dan penilaian kinerja dan tiga proses yaitu (3) partisipasi, (4) regulasi internal dan (5) audit sosial.

Hasil temuan tersebut akan dijabarkan sesuai dengan lima dimensi dan dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas dan implementasi sifat Rasul sehingga akan diperoleh wujud akuntabilitas Masjid Rahmat Surabaya. Kemudian, peneliti akan memberikan rekomendasi terkait akuntabilitas yang ada pada Masjid Rahmat Surabaya berdasarkan hasil analisis yang ada.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bentuk akuntabilitas Masjid Rahmat Surabaya secara menyeluruh. Studi kasus adalah pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang menekankan pada proses di mana peneliti harus berinteraksi secara reguler dengan subjek penelitian di dalam lokasi penelitian, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta berfokus pada pemahaman dan penafsiran peneliti atas objek penelitian (Basuki, 2016:21). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-eksplanatoris yaitu dengan mengungkapkan dan menjelaskan objek dan subjek seperti apa adanya kemudian menjawab proposisi yang telah diajukan peneliti. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan akan suatu makna daripada generalisasi untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan studi kasus juga pernah dilakukan dalam penelitian terkait akuntabilitas masjid oleh Simanjuntak dan Januarsari (2011), Siregar (2014), Kismawadi dkk., (2018), serta Fanani (2020).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas data dan informasi yang kelak juga akan meningkatkan kualitas penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif berupa keterangan baik secara lisan, tulisan maupun dokumen. Data yang diperlukan pada penelitian ini mencakup informasi mengenai praktik akuntabilitas di Masjid Rahmat Surabaya terutama kegiatan pengelolaan oleh takmir masjid serta pelaporan dan pengungkapan keuangan masjid. Waktu penelitian direncanakan untuk dilakukan secara bertahap, yang diawali pada tahun 2021. Lalu tahap penggalan data dilakukan hingga akhir bulan Mei 2022.

Informasi yang akan digali adalah mengenai bagaimana proses pengelolaan masjid yang dijalankan sebagai bentuk implementasi akuntabilitas masjid. Pada penelitian ini, peneliti menggali informasi baik dari pihak internal maupun eksternal terkait pengelolaan masjid melalui pengamatan pada sumber daya manusia sebagai organ penggerak dan pengelola masjid, dokumen sebagai rekam jejak proses pengelolaan masjid dan pedoman pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan masjid, serta program atau kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan masjid pada masyarakat dan jamaah. Oleh sebab itu, peneliti memilih menggunakan metode pengumpulan data dengan berpedoman pada buku karya Basuki (2016) yaitu dokumentasi dan catatan arsip, wawancara, observasi. Buku tersebut (Basuki, 2016:51) juga memuat metode pengumpulan data dengan artefak fisik namun peneliti memilih tidak menggunakan hal tersebut sebab peneliti menganggap artefak fisik yang dapat ditemukan di subjek hanya sedikit serta kurang berpengaruh dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan Masjid Rahmat Surabaya serta data terkait manajemen masjid dalam proses implementasi akuntabilitas pada Masjid Rahmat Surabaya. Secara umum, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi berarti peneliti melakukan kajian, mempelajari atau mereview dokumen dan catatan arsip yang diterima atau diperoleh dari narasumber. Lalu membuat catatan-catatan untuk mempertegas poin penting mungkin juga dilakukan peneliti (Basuki, 2016:62). Pada penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data terkait keuangan berupa laporan keuangan periode berjalan dan dokumen pendukung keuangan masjid selama Januari hingga Mei 2022 serta data tentang tata kelola masjid, seperti pernyataan visi dan misi, standar operasional, struktur organisasi, hasil rapat, kumpulan agenda, pengumuman dan dokumen lainnya, yang digunakan sebagai penunjang penelitian dalam menjawab bagaimana implementasi akuntabilitas Masjid Rahmat Surabaya.

2. Wawancara / Interview

Peneliti memilih melakukan wawancara karena dapat menggambarkan kondisi secara utuh dan menyeluruh dari praktik manajemen dan akuntabilitas Masjid Rahmat Surabaya melalui sudut pandang narasumber. Berikut daftar narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bendahara Umum Takmir masjid sebagai pihak yang bertugas sebagai penanggungjawab utama terkait keuangan masjid termasuk proses pencatatan hingga pelaporan keuangan serta pemeriksaan keuangan tiap divisi. Wawancara pada narasumber ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses pelaporan keuangan dan penganggaran serta pengendalian keuangan internal masjid;
- b. Sekretaris Umum masjid sebagai pihak yang bertanggungjawab atas administrasi dan pengarsipan dokumen terkait masjid. Wawancara pada narasumber ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait arsip dan dokumen mengenai akuntabilitas dan tata kelola masjid;
- c. Staf takmir sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan masjid dan pelayanan pada jamaah. Wawancara pada narasumber ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai realisasi pelayanan pada jamaah masjid;
- d. Jamaah tetap masjid sebagai penerima manfaat pelayanan dari takmir.

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara tersebut termasuk ke dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat lebih fleksibel dan cenderung seperti percakapan informal biasa. Walaupun demikian, peneliti tetap membuat pedoman berisi daftar pertanyaan wawancara secara sistematis sebelum wawancara dilaksanakan. Hal tersebut berfungsi sebagai panduan selama proses wawancara agar peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam namun tetap sesuai kebutuhan penelitian.

3. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri secara langsung pada kegiatan bersama anggota organisasi yang diobservasi atau dengan kata lain menggunakan observasi partisipatoris (*participant observation*). untuk menggali sumber data secara mendalam pada objek yang diteliti. Pemilihan jenis observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan kealamiahannya hasil serta aspek kemanfaatan. Fokus observasi pada penelitian ini adalah perilaku takmir dan jamaah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid seperti peribadatan sehari-hari yang meliputi penentuan muadzin dan imam, kegiatan pengajian yang meliputi pemilihan ustadz hingga publikasi kegiatan, serta proses tata kelola masjid yang meliputi pendelegasian wewenang, penugasan takmir pada tiap bagian, hingga pelaksanaan pelaporan keuangan. Observasi pada kegiatan tersebut dapat menggambarkan implementasi akuntabilitas Masjid Rahmat.

3.3 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga selesainya penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis *pattern matching* yaitu dengan menyelaraskan temuan dengan kriteria dan indikator yang telah ditentukan serta teori yang relevan kemudian menjelaskannya secara logis (Basuki, 2016:72). Data atau temuan akan dibandingkan dengan indikator (dimensi, mekanisme, dan implementasi sifat rasul) akuntabilitas masjid yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini tahapan analisis dan interpretasi yang akan dilakukan peneliti, antara lain:

1. Analisis data yang diperoleh dari dokumentasi dimulai dengan melakukan penyortiran, tabulasi, serta peringkasan sesuai dengan kerangka konseptual. Kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan kesesuaiannya dengan jenis dokumen dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Dalam triangulasi data dokumentasi, peneliti menguji validitas dan reliabilitas data dengan membandingkan data dokumen dengan data dokumen terkait lainnya. Hasil dari analisis data dokumentasi ini akan dipadukan kembali dengan

hasil analisis data wawancara dan observasi saat melakukan triangulasi metode;

2. Analisis data wawancara dimulai dari melakukan transkripsi data menjadi data teks. Kemudian data tersebut direduksi dan diseleksi sesuai dengan kerangka konseptual. Setelah itu, data dikelompokkan sesuai topik terkait pertanyaan penelitian yang akan dijawab, tingkatan dan kelompok narasumber. Proses tersebut dilanjutkan dengan melakukan triangulasi untuk mengecek validitas dan reliabilitas data sesuai kelompok pertanyaan penelitian yang akan dijawab dan informan. Hasil dari analisis data wawancara ini akan digunakan kembali dengan hasil analisis data dokumentasi dan observasi saat melakukan triangulasi metode;
3. Analisis terhadap data observasi dimulai dengan melakukan transkripsi data menjadi data teks. Kemudian data tersebut disortir, ditabulasi dan diseleksi sesuai dengan kerangka konseptual dan objek yang diobservasi. Setelah itu, data dikelompokkan sesuai pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Proses tersebut dilanjutkan dengan melakukan triangulasi untuk mengecek validitas dan reliabilitas data sesuai kelompok topik terkait dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Hasil dari analisis data observasi ini akan digunakan kembali dengan hasil analisis data dokumentasi dan wawancara saat melakukan triangulasi metode;
4. Melakukan triangulasi metode untuk menguji keandalan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;
5. Mengintegrasikan hasil triangulasi metode data dari tiga metode tersebut dengan memori visual, suara, emosi dan catatan khusus yang muncul dan dialami peneliti selama proses pengumpulan data;
6. Membandingkan pola temuan dengan proposisi dan kriteria yang ditentukan;
7. Membandingkan temuan dengan teori yang relevan yaitu dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta implementasi sifat rasul;
8. Menjelaskan secara logis hasil perbandingan temuan tersebut.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Permasalahan akuntabilitas masih sering terjadi pada beberapa masjid. Pelaporan keuangan yang masih sangat sederhana (Mufidah, 2018; Sitompul dkk., 2016) dan tidak sesuai dengan ISAK 35 masih dijumpai pada beberapa masjid. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukannya audit eksternal pada masjid. Di sisi lain, Akuntabilitas masjid harus juga dilihat dari aspek lain seperti bentuk pemenuhan kepatuhan hukum, spiritualitas takmir, serta aspek-aspek keorganisasian lain. Melihat kembali hal tersebut peneliti memutuskan untuk membahas bentuk akuntabilitas masjid Rahmat melalui dimensi akuntabilitas spiritual, hukum, program, proses, dan keuangan. Dalam pengungkapan melalui masing-masing dimensi akuntabilitas, peneliti juga menggunakan pertimbangan mekanisme akuntabilitas serta pengimplementasian sifat rasul sebagai indikator penguji. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan beberapa proposisi untuk menafsirkan akuntabilitas masjid Rahmat. Pada tahap terakhir, Peneliti menggunakan proposisi untuk menafsirkan data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menyimpulkan hasil penelitian.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Spiritual Masjid Rahmat

Akuntabilitas spiritual dapat dilihat dari bentuk cara takmir memaknai amanah dan bentuk motivasi yang dimiliki takmir dalam menjalankan amanahnya. Takmir sebagai manusia juga memiliki alasan tersendiri yang memotivasi dirinya dalam menerima amanah menjadi pengelola masjid. Pada akhirnya niatlah yang menjadi tolok ukur pertama dalam keberkahan suatu perbuatan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan para narasumber terkait motivasi untuk menerima amanah di masjid Rahmat:

“Satu ya kita berusaha maksimal untuk mengembangkan masjid rahmat dalam seluruh bidang sehingga masjid rahmat menjadi ikon kota Surabaya. Kedua tentunya harus diiringi nilai perjuangan dan keikhlasan. Kalau visi misi kemasjidan itu tidak ada nilai perjuangan dan keikhlasan *wis* tidak mungkin tercapai dengan baik.” (**Pak Haji Riduwan, Sekretaris Umum**)

” Karena saya itu kebetulan sudah pensiun yang secara umur sudah 60 lebih daripada saya diam di rumah ya agar hidup saya lebih berkah dan bermanfaat saya mengabdikan di masjid” (**Pak Besar, Bendahara Umum**)

“Kami kan dulu sifatnya jamaah terus sering bantu-bantu di sini. Niatnya di sini ibadah, memuliakan rumah Allah. Prinsip saya itu jika kita memuliakan rumah Allah insyaaAllah kita akan dimuliakan oleh Allah.” (**Pak Priadi, Staf Kantor**)

Peneliti berpendapat bahwa tiga pernyataan tersebut menunjukkan kesamaan niat motivasi takmir yang bermuara pada pengabdian dan keikhlasan. Keinginan untuk mengabdikan dengan ikhlas adalah hal yang dirasa utama oleh takmir dalam meningkatkan akuntabilitas spiritual masjid. Segala sesuatu yang didasarkan pada keikhlasan maka akan menjadi berkah dan mulia. Sebab ikhlas berkaitan erat dengan ketauhidan, sikap meyakini bahwa segala sesuatu bermula dan bermuara pada Allah. Dengan memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah untuk Allah dan Allah selalu mengawasinya, maka akan mendorong takmir untuk bersikap ikhlas, jujur dan berintegritas dalam menjalankan amanahnya.

Peneliti ingin melengkapi pembahasan akuntabilitas spiritual dengan pernyataan takmir saat diwawancara terkait cara menghayati nilai keislaman melalui sifat-sifat rasul. Berikut hasil wawancara peneliti terkait bagaimana takmir menghayati nilai-nilai keislaman dan sifat rasul:

“Itu (nilai sifat rasul) memang harus dimiliki oleh seorang pengurus atau takmir. Jadi takmir itu harus *shiddiq*, bisa dipercaya. (Lalu) Bagaimana kita bisa dipercaya? Misalkan masalah keuangan kita harus menyampaikan informasi secara jujur kepada masyarakat. *Fathanah*, cerdas, ya harus inovatif dalam mengadakan kegiatan. *Tabligh*, menyampaikan, ya semua program kita sampaikan baik itu (kepada) internal maupun eksternal. *Amanah* ya tentunya berkewajiban menjaga marwah Masjid Rahmat ini bisa dipercaya ke masyarakat dan jamaah khususnya di Surabaya.” (**Pak Haji Riduwan, Sekretaris Umum**)

“Saya belum sampai tingkatan hingga menghayati nilai keislaman secara mendalam begitu mas. Saya ke Masjid itu tujuannya mencari pahala. Dalam segi agama, kalau yang baik ya saya laksanakan. Misalnya saya harus menyelesaikan tugas saya dengan benar seperti ini, ya saya selesaikan sebaik

mungkin. Kalau ditanya tentang tanggung jawab apalagi tentang uang, ya saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Saya simpan yang baik, kalau orang mau mengeluarkan uang itu saya tanya detail bagaimana, siapa yang butuh atau siapa yang menerima, jadi kita dapat mengeluarkan sesuai kebutuhan.” (**Pak Besar, Bendahara Umum**)

“Karena kami bukan dari ahli agama, kami cuma bisa memberikan yang terbaik bagi kita dan jamaah. Jadi kami tidak bisa memberikan dakwah dengan dalil agama ke jamaah tapi kami berusaha menampilkan akhlak terbaik kepada satu sama lain.” (**Pak Priadi, Staf Kantor**)

Pernyataan antar takmir memang berbeda yang disebabkan perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup para narasumber. Pak Haji Riduwan menjelaskan bentuk pengimplementasian dengan detail tiap poin sifat rasul dan kewajiban menanamkan nilai-nilai keislaman dan sifat rasul pada diri setiap takmir namun Pak Besar dan Pak Priadi memberikan pernyataan yang lebih sederhana seperti harus diniatkan sebagai ibadah serta harus melakukan yang terbaik sesuai amanah dan kemampuan masing-masing. Melalui pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun takmir Masjid Rahmat Surabaya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penghayatan nilai sifat rasul. Takmir sepakat diperlukan penyampaian informasi keuangan yang jujur serta harus didasari integritas dalam menjalankan amanah.

Masjid Rahmat Surabaya telah berupaya membentuk lingkungan organisasi masjid yang lebih jujur dan akuntabel melalui pemahaman penghayatan nilai-nilai keagamaan dan sifat *shiddiq*. Hal itu dapat dilihat dari kepengurusan takmir yang dipimpin oleh K.H. Abdul Muchid Murtadho serta proses penetapan kebijakan yang selalu dikonsultasikan dengan para pembina yang terdiri dari K.H. Agoes Ali Masyhuri, K.H. Mas Sulaiman, Anis Busroni, Achmad Murtafi Haris, Drs. Ahmad Syauqi. Dewan pembina memiliki anggota dua orang Kyai memegang peranan penting dalam pembinaan organisasi dan spiritualitas takmir Masjid Rahmat Surabaya. Selain itu, hampir seluruh keputusan penting dalam kepengurusan takmir seperti desain besar organisasi juga harus melalui persetujuan Dewan pembina.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam aspek dimensi akuntabilitas spiritual Masjid Rahmat Surabaya telah dijalankan dengan baik. Masjid Rahmat Surabaya melalui pembinaan keorganisasian dan spiritualitas

dari dewan pembina telah mengukuhkan nilai-nilai keislaman sebagai dasar pengelolaan masjid. Selain itu, melalui pernyataan dari para narasumber diperoleh bahwa para narasumber memiliki rasa ikhlas dalam pengabdianya untuk memakmurkan masjid serta sangat memahami pentingnya pelaporan dan pengawasan keuangan yang jujur dan akuntabel sebagai bentuk dakwah melalui akhlak yang baik. Hal tersebut sesuai dengan proposisi yang diajukan peneliti yaitu (P1) Penghayatan nilai-nilai keagamaan dan sifat *shiddiq* akan membentuk lingkungan organisasi masjid yang lebih jujur dan meningkatkan akuntabilitas spiritual.

4.2.2 Akuntabilitas Hukum Masjid Rahmat

Dimensi akuntabilitas hukum erat kaitannya dengan kepatuhan masjid Rahmat Surabaya terhadap regulasi yang berlaku baik dalam bentuk pengesahan sebagai badan hukum serta kepatuhan terkait hal-hal operasional. Sebagai implikasi sikap amanah takmir terhadap akuntabilitas hukum, Masjid Rahmat Surabaya telah mengukuhkan diri sebagai badan hukum melalui SK Menkumham Nomor AHU-0015220.AH.01.04 tahun 2015 dan sedang dalam proses pengurusan SK baru sebab ada pergantian susunan pengurus takmir masjid Rahmat. Pembentukan Yayasan Masjid Rahmat Surabaya sementara ini masih berdasarkan akta notaris Bachtiar Hasan Nomor 16 tertanggal 25 September 2015.

Masjid Rahmat Surabaya dalam kegiatan operasionalnya sangat memperhatikan kepatuhan hukum. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para narasumber terkait pemahaman takmir mengenai kepatuhan terhadap beberapa regulasi yang mengatur operasional masjid, seperti berikut:

“Kita tetap menjaga agar tidak menyalahi peraturan tersebut. Kita dalam mengelola masjid harus mengutamakan keamanan. Aman sesuai regulasi, penggunaan keuangan dan secara hukum tidak menyalahi aturan. Kemudian aman *syar’i* yang juga berarti menjaga nilai-nilai keislaman masjid yang sesuai *ahlussunnah wal jamaah* dan dalam pelaksanaan kita mengikuti Nahdhlatul Ulama. Lalu harus ada aman NKRI yaitu kita harus menjauhi mereka yang memiliki aliran-aliran keras dan bertentangan dengan Pancasila.” (**Pak Haji Riduwan, Sekretaris Umum**)

Pak Haji Riduwan menyatakan bahwa kepatuhan atas regulasi yang berlaku adalah wajib. Beliau juga mengemukakan bahwa pengelolaan masjid juga harus didasarkan pada kepatuhan terhadap syariat Islam yang sesuai *ahlussunah wal jamaah* dan ideologi Pancasila. Pernyataan lain diungkapkan oleh Pak Besar. Beliau memfokuskan pada isu terkait aturan pengeras suara masjid, berikut pernyataan beliau :

“Kalau tentang speaker, dari dulu kita gunakan sesuai kemampuannya. Nah walaupun sekarang ada himbauan dari kementerian agama mengenai batasan volume suara speaker, kita masih belum bisa mengukurnya jadi masih menggunakan speaker seperti biasanya.” (**Pak Besar, Bendahara Umum**)

Berdasarkan pernyataan Pak Besar, peneliti menyimpulkan bahwa dari pihak takmir belum dapat mengukur dan mengatur kencangnya suara speaker. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara informal kepada beberapa jamaah terkait suara speaker masjid dan peneliti menemukan bahwa mereka tidak merasa terganggu terhadap suara yang dihasilkan masjid sebab suara dari masjid hanya keras di waktu-waktu menjelang salat.

“Enggak mengganggu sih mas. Kan biasanya *paling* kerasnya ya *pas* azan sama yang sebelum azan, apa itu namanya... sholawat ya itu, sama *pas* khotbah *jumatan*. Jadi ya saya tidak pernah merasa terganggu.”(**Jamaah Masjid Rahmat**)

Selain itu, peneliti juga tidak menemukan rumah ibadah agama lain yang berdekatan dengan masjid Rahmat yang terdampak suara dari masjid, adapun gereja terdekat terletak di seberang jalan raya yang jauh dari masjid. Jika menelisik kembali dari Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor KEP/D/101/’78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola, maka Masjid Rahmat Surabaya meskipun terletak di kota besar, lokasinya terdapat di dalam perkampungan yang jauh dari rumah ibadah agama lain dan memiliki masyarakat yang cenderung homogen muslim sehingga tanggapan masyarakat cenderung positif apalagi suara masjid Rahmat hanya keras di waktu-waktu menjelang salat dan jika ada kegiatan besar seperti haul mbah Karimah.

Silvia & Ansar (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas hukum merupakan suatu jaminan mengenai adanya peraturan terkait dengan supremasi hukum atau peraturan lain dalam organisasi. Oleh sebab itu diperlukan *Self-regulation*. *Self-regulating* atau pembentukan regulasi operasional secara mandiri oleh anggota organisasi merupakan cara organisasi mengatur dan mengelola asetnya guna mencapai tujuan organisasi. Pembentukan regulasi internal masjid Rahmat melalui musyawarah antara pengurus takmir masjid dan dewan pembina yang telah merepresentasikan masyarakat sekitar dan para kyai sebagai tokoh organisasi Nahdhlatul Ulama. Bentuk *self-regulation* dari masjid Rahmat adalah pembentukan Visi dan Misi, AD/ART, dan aturan internal lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, akuntabilitas Masjid Rahmat ditinjau dari dimensi hukum sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya masjid Rahmat dalam mematuhi regulasi yang berlaku dan telah mengukuhkan diri sebagai badan hukum. Sikap takmir yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum dengan memerhatikan syariat Islam yang sesuai *ahlussunah wal jamaah* dan ideologi Pancasila juga lingkungan sekitar memperkuat akuntabilitas masjid. Selain itu, melalui mekanisme *self-regulating*, Masjid Rahmat telah mampu membuat peraturannya secara mandiri dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat sekitar.

Sifat amanah merupakan bentuk lain dari profesionalisme yang terwujud dalam kepatuhan takmir terhadap regulasi yang berlaku baik dari kementerian agama maupun internal sehingga tidak pernah terjadi kasus hukum yang melibatkan anggota takmir terutama yang terkait keuangan masjid. Ini menjawab proposisi kedua yang diajukan oleh peneliti yaitu (P2) Penerapan sifat amanah diterapkan takmir dalam pemenuhan kepatuhan hukum negara dan adanya regulasi internal dapat meningkatkan akuntabilitas masjid pada dimensi hukum.

4.2.3 Akuntabilitas Program Masjid Rahmat

Akuntabilitas program dapat dimaknai sebagai cara masjid mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam visi dan misinya melalui program yang telah disusun. Program yang baik harus dimulai dengan perumusan yang matang. Perumusan yang matang tidak hanya harus disusun berdasarkan kesesuaian dengan tujuan organisasi namun juga harus adaptif dan inovatif terhadap perkembangan masyarakat sehingga terjalin hubungan harmonis antara takmir dan jamaah.

Penilaian atas akuntabilitas program dimulai dari bagaimana takmir merumuskan programnya. Takmir merumuskan program melalui musyawarah tahunan yang dilakukan pada akhir bulan Desember. Musyawarah tahunan diawali dengan pemaparan capaian tiap seksi atas program yang telah berjalan kemudian dilanjutkan evaluasi oleh pengurus, dewan pembina dan pengawas. Lalu pengurus tiap seksi diberikan waktu untuk bermusyawarah terkait perencanaan program yang akan dilaksanakan tahun depan. Jika belum ditemukan adanya kesepakatan terkait rancangan tersebut maka musyawarah akan dilanjutkan secara internal dalam waktu yang sesegera mungkin dan hasilnya akan diberikan kepada forum pengurus. Hal lain yang ditemukan peneliti melalui wawancara informal adalah tidak ditemukannya indikator performa yang jelas pada proses evaluasi serta tidak adanya batasan waktu dalam penentuan rancangan kegiatan untuk periode selanjutnya sehingga kadang ditemui kegiatan telah berjalan namun tidak tercatat di rancangan program musyawarah tahunan serta tidak mendapat anggaran dana.

Masjid Rahmat tidak hanya menjalankan program sesuai yang direncanakan pengurus namun juga terbuka dengan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam pelaksanaan kegiatan, takmir masjid tidak jarang melibatkan masyarakat sebagai tenaga sukarela. Walaupun dianggap tenaga sukarela, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan masjid tetap mendapat kompensasi dari masjid. Selain itu, masjid Rahmat juga terbuka bagi pihak eksternal untuk menyelenggarakan kegiatan di masjid. Hal ini dapat dilihat dari

wawancara dengan pak Haji Riduwan tentang pendapat mengenai pihak eksternal ingin mengadakan kegiatan di masjid :

“Bisa langsung menghubungi kami. Contohnya kegiatan satu Muharram ada pihak luar yang ingin mengadakan acara di masjid ya kita menyesuaikan dengan keadaan. Untuk perizinannya, pihak ketiga harus membuat surat permohonan dan dibawa ke sini. Kemudian kita lihat dan seleksi kelayakan dan kejelasan organisasi tersebut. Kita pastikan jangan sampai ada organisasi terlarang mengadakan kegiatan di sini. Banyak yang mengusulkan banyak juga yang kita tolak karena tidak sepaham dengan kita.” (**Pak Haji Riduwan, Sekretaris Umum**)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk keterbukaan yang ditawarkan Masjid Rahmat berupa penyediaan tempat maupun bantuan secara finansial tergantung bentuk kerja sama yang diajukan namun dalam beberapa kasus, proposal kerja sama tidak jarang juga ditolak oleh pihak takmir sebab kegiatan yang diajukan kurang jelas atau tidak sepaham dengan prinsip yang dianut masjid Rahmat Surabaya.

Sayangnya, pada sisi lain akuntabilitas program yaitu peran remaja masjid dan pelatihan kompetensi bagi takmir masih belum baik. Dalam wawancara dengan Pak Haji Riduwan ditemukan bahwa remaja masjid bersifat kurang inovatif dan proaktif dalam menjalankan perannya sebagai calon generasi penerus masjid. Mereka cenderung hanya mengikuti rancangan kegiatan yang direncanakan takmir tanpa berinovasi meskipun sering dimotivasi oleh pihak takmir. Selain itu, Masjid Rahmat juga belum pernah mengadakan pelatihan khusus bagi takmir terkait kemampuan keorganisasian maupun studi banding ke masjid lain. Program peningkatan kompetensi yang berjalan di masjid Rahmat hanyalah saling berbagi ilmu dan pengalaman antar pengurus.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam aspek dimensi akuntabilitas program Masjid Rahmat menjalankannya dengan kurang baik. Hal itu dapat dilihat dari proses evaluasi yang kurang detail sehingga tidak ada indikator yang jelas dalam menyusun rancangan program. Selain itu tidak

adanya target waktu untuk segera menentukan rancangan kegiatan menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan tanpa persiapan dan pengelolaan yang baik. Kemudian tidak ditemukannya pelatihan dasar-dasar kompetensi keorganisasian bagi takmir sebagai pelaksana program serta remaja masjid yang cenderung pasif membuat sulit untuk mengembangkan program yang inovatif dan berkualitas. Situasi ini menunjukkan bahwa takmir masjid Rahmat belum dapat menerapkan sifat *fathanah* dengan baik yang dalam implementasinya, takmir dianjurkan melakukan pembinaan kreativitas guna mengembangkan masjid menjadi adaptif dan inovatif. Hal ini juga yang menyebabkan tidak terjawabnya proposisi peneliti (P6) yaitu Penerapan sifat *fathanah* melalui pembinaan kreativitas terkait pengelolaan organisasi akan membentuk lingkungan organisasi masjid yang inovatif dan adaptif serta meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas program masjid. Sebagai upaya untuk memperbaiki hal tersebut, takmir akan mengagendakan pembahasan detail mengenai indikator capaian program untuk tahun berjalan pada musyawarah tahunan.

Di sisi lain, keterbukaan masjid Rahmat kepada masyarakat sudah baik. Masjid Rahmat tidak hanya terbuka kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatannya tapi juga membuka pintu kerja sama bagi pihak eksternal selama tidak bertentangan dengan prinsip yang dianut masjid. Masjid Rahmat terus berupaya meningkatkan publikasinya melalui penggunaan media sosial. Saat ini masjid Rahmat juga sedang mengembangkan SOP dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakannya serta indikator yang lebih detail untuk program kerja tahunannya sehingga dapat menghasilkan program yang lebih adaptif dan inovatif sesuai dengan visi misi Masjid Rahmat. Kondisi ini mencitrakan bahwa takmir telah mengimplementasikan sifat amanah secara baik dengan telah melakukan tugasnya sebaik mungkin serta selalu siap bekerja sama dengan masyarakat. Sinergi keterbukaan takmir dan peran aktif jamaah dalam pelaksanaan program masjid akan menciptakan lingkungan masjid yang harmonis dan akuntabel. Hal

ini telah sesuai dengan proposisi yang diajukan peneliti (P4) Penerapan sifat amanah pada pengelolaan masjid dapat diwujudkan dengan secara proaktif melibatkan jamaah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan masjid sehingga terjalin hubungan harmonis antara takmir dan jamaah serta dapat memacu peningkatan akuntabilitas program masjid.

4.2.4 Akuntabilitas Proses Masjid Rahmat

Akuntabilitas proses merupakan cara masjid untuk mengungkapkan alur kerja dan prosedur organisasinya kepada masyarakat. Masjid sebagai organisasi publik wajib memberikan pelayanan yang efisien bagi jamaah. Untuk mencapai pelayanan yang efisien diperlukan standar operasional dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami. Masjid Rahmat mengatur tata kelola organisasinya berdasarkan AD/ART yang dibentuk oleh pengurus serta dewan pembina dan dikukuhkan dengan akta notaris serta SK pendirian. Di sisi lain, walaupun sudah tercatat dalam AD/ART, pelaksanaan tata kelola masjid Rahmat saat ini masih didasarkan pada budaya organisasi yang sudah mengakar sejak kepengurusan sebelumnya sehingga takmir belum memiliki SOP secara tertulis yang spesifik untuk tiap seksinya. Jika timbul fenomena baru maka takmir masjid Rahmat akan melakukan musyawarah secara internal untuk mencari solusi atas fenomena tersebut.

Pembatasan wewenang dan kewajiban serta pendelegasian tugas adalah salah satu bagian dari akuntabilitas proses. Pembatasan wewenang dan kewajiban yang jelas akan menjadikan pelayanan yang lebih efisien sebab pengurus dapat menjalankan fungsinya dengan tanpa keraguan. Berdasarkan observasi peneliti, masjid Rahmat memiliki pembagian tugas yang cukup efisien walaupun tidak ditemukannya pedoman tertulis terkait wewenang dan kewajiban takmir. Peneliti menemukan bahwa takmir pada bagian pelayanan jamaah mudah ditemui dan sangat memahami wewenang dan kewajibannya sesuai bagian tugasnya. Selain itu, takmir masjid Rahmat juga memiliki prosedur pendelegasian wewenang yang cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan Pak Haji Riduwan, peneliti menemukan bahwa prosedur pendelegasian

wewenang harus diawali dengan penyampaian informasi terkait undangan kepada ketua umum, kemudian didiskusikan dengan menimbang jenis dan bentuk undangan lalu diputuskan pengurus yang ditugaskan sebagai delegasi untuk memenuhi undangan tersebut.

Pembatasan wewenang dan pendelegasian tugas harus didukung sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang terkomputerisasi dan mudah diakses adalah kunci peningkatan akuntabilitas proses. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan sistem informasi yang terdapat pada masjid Rahmat sebagian besar masih manual namun pada sistem keuangan sudah mulai beralih ke sistem yang terkomputerisasi. Pencatatan terkait pelayanan administrasi dan pengarsipan keuangan di sekretariat takmir masih manual sehingga terkadang membutuhkan waktu untuk mencari arsip tersebut. Di sisi lain, laporan keuangan yang dibuat bendahara umum sedang dalam masa peralihan menjadi terkomputerisasi. Meskipun telah terkomputerisasi, laporan bendahara umum belum dapat diperbarui secara *realtime* sebab belum memiliki aplikasi sistem yang memadai dan hanya menggunakan *microsoft excel*. Menurut Pak Haji Riduwan, pihak takmir pernah mendapat tawaran aplikasi keuangan masjid dari ITS namun masih belum diterapkan.

Kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang tidak kalah penting dalam memahami kualitas akuntabilitas proses masjid. Takmir sebagai organ penggerak organisasi harus memiliki kompetensi dan kecakapan dalam menjalankan amanahnya. Oleh sebab itu, proses penyeleksian dan pembinaan kompetensi takmir harus menjadi perhatian oleh masjid. Pertimbangan utama takmir masjid Rahmat adalah niat dan motivasi orang tersebut sebab pekerjaan sebagai takmir adalah pengabdian di mana terkadang penghasilannya tidak setinggi pekerjaan profesional. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Pak Haji Riduwan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar takmir di masjid Rahmat adalah warga Kembang Kuning yang mengabdikan dirinya untuk memakmurkan masjid Rahmat bahkan terdapat takmir yang bersedia tidak digaji. Hal lain yang ditemukan peneliti adalah beberapa takmir memang direkrut sebab memiliki kemampuan atau pengalaman terkait jabatannya

namun terdapat juga takmir yang direkrut karena kesetiaannya mengabdikan di masjid. Hal ini yang menyebabkan kompetensi takmir terkadang tidak sesuai dengan amanah yang diemban sehingga mempersulit peningkatan akuntabilitas proses.

Berdasarkan pemaparan di atas, akuntabilitas masjid Rahmat ditinjau dari dimensi akuntabilitas proses masih belum baik. Hal ini ditinjau dari tata kelola organisasi yang tidak didasarkan pada AD/ART, tidak tersedianya SOP tertulis, sistem pengarsipan yang masih bergantung pada dokumen cetak, sistem informasi akuntansi yang belum dapat diakses secara *realtime*, dan kompetensi takmir yang tidak sesuai dengan jabatannya. Masjid Rahmat terus berusaha meningkatkan kualitas sistem informasi dan pelayanannya dengan mempelajari pelaporan keuangan yang sesuai ISAK 35, melakukan kerja sama dengan pihak eksternal untuk membentuk sistem informasi akuntansi, merekrut tokoh masyarakat sekitar agar memudahkan penyebaran informasi dari masjid kepada masyarakat serta saling berbagi pengetahuan mengenai komputer dan keuangan antar takmir. Selain itu, takmir kembali berusaha meningkatkan kualitas komunikasi dengan dewan pembina untuk membahas alur wewenang dan tanggung jawab serta standar operasional yang lebih jelas serta mengagendakan digitalisasi arsip.

Amanah juga berimplikasi kepada cara takmir menjelaskan pertanggungjawabannya atas pelayanan yang diberikan pada jamaah. Masjid Rahmat mengungkapkan pertanggungjawabannya pada musyawarah tahunan yang dihadiri oleh pengurus, dewan pembina dan pengawas. Namun pada tubuh dewan pembina dan pengawas terdapat tokoh agama dan masyarakat sekitar sehingga secara tidak langsung pertanggungjawaban atas pelayanan jamaah telah tersampaikan pada masyarakat. Selain itu, takmir juga selalu terbuka untuk menjelaskan secara perorangan pada jamaah yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam terkait pertanggungjawaban masjid. Hal itu sesuai dengan proposisi yang diajukan peneliti yaitu (P3) Penerapan sifat amanah diterapkan takmir dalam pengungkapan pertanggungjawaban atas

pelayanan yang diberikan pada jamaah dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan akuntabilitas proses masjid serta membentuk lingkungan organisasi masjid yang berintegritas.

Penyampaian informasi yang optimal dan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat merupakan implementasi dari sifat *tabligh*. Masjid Rahmat belum memiliki sistem informasi manajemen dan akuntansi yang memadai dan sangat bergantung pada pencatatan secara manual. Selain itu, takmir juga mengakui bahwa laporan keuangan tiap pekan yang diumumkan secara lisan belum transparan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan jamaah. Masjid Rahmat yang sadar akan pentingnya hal tersebut, kini terus berupaya mempelajari pelaporan yang ISAK 35 dan melakukan kerja sama pembuatan sistem informasi akuntansi. Ini kurang sesuai dengan proposisi yang diajukan peneliti yaitu (P5): Penerapan sifat *tabligh* melalui transparansi informasi dan pembentukan sistem informasi akuntansi dan manajemen diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait akuntabilitas masjid dan meningkatkan akuntabilitas Proses masjid.

4.2.5 Akuntabilitas Keuangan Masjid Rahmat

Dimensi akuntabilitas keuangan merupakan dimensi yang digunakan peneliti untuk memeriksa bentuk pengelolaan uang publik oleh masjid. Implementasi dimensi ini adalah bagaimana masjid menerima, mengelola, melaporkan dan mengungkapkan keuangannya. Masjid Rahmat sebagai organisasi publik yang bergerak dalam bidang keagamaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan laporan keuangannya kepada publik.

Peneliti mengawali penilaian dimensi ini dengan memeriksa proses penganggaran yang dilakukan masjid. Tak ubahnya perumusan program, masjid Rahmat melakukan proses penganggaran atas program utama pada musyawarah tahunan di akhir bulan Desember. Selain itu masjid Rahmat melalui bendahara umum juga melakukan penganggaran kas kecil tiap pekan. Penggunaan kas kecil pada masjid rahmat adalah sebagai pembiayaan yang bersifat insidental dan nilainya tidak terlalu signifikan namun terdapat hal lain

yang ditemukan peneliti yaitu tidak adanya bukti catatan mengenai kas kecil yang seharusnya dianggarkan tiap pekan serta tidak terdapat kas kecil dalam jurnal maupun laporan keuangan masjid.

Peneliti melanjutkan penilaian dengan meneliti bagaimana proses pencatatan pemasukan yang diterima masjid. Penelitian ini tidak memeriksa segmen pendidikan dari masjid Rahmat Surabaya sebab belum adanya konsolidasi laporan keuangan antara yayasan dan sekolah. Selayaknya sebagian besar masjid, Masjid Rahmat mendapat pendanaan utama melalui zakat, infak, dan sedekah. Sumber pendanaan itu dapat berupa kas maupun donasi digital. Penerimaan berupa kas berasal dari kotak infak dan penerimaan dari kegiatan pelayanan masjid. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti merumuskan alur kerja penerimaan masjid Rahmat sebagai berikut:

1. Penerimaan dana melalui kotak infak.

Proses pengumpulan dan perhitungan dana yang berasal dari kotak infak dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan letak kotak infak yaitu kotak infak Jumat, kotak infak parkir, kotak infak besar. Penerimaan dari kotak infak Jumat hanya dihitung saat setelah salat Jumat oleh petugas dan Bendahara. Proses penghitungan kotak infak Jumat dilakukan di aula atas masjid Rahmat oleh beberapa petugas dan setelah itu hasilnya akan dilaporkan kepada Bendahara umum untuk dicatat. Selain itu, terdapat penerimaan dari kotak besar yang dihitung pada tiap hari Sabtu di ruang kerja Bendahara. Penerimaan dari kotak besar ini merupakan yang paling tinggi di antara penerimaan dari sumber lainnya. Yang terakhir adalah pencatatan penerimaan dari kotak infak parkir. Penghitungan dari sumber ini tidak memiliki jadwal pasti sebab jumlahnya tidak besar. Pada proses akhir, semua pendapatan akan disetor kepada Bendahara umum lalu dibuatlah laporan keuangannya.

2. Penerimaan kegiatan insidental

Penerimaan kegiatan insidental merupakan penerimaan yang didapat secara tidak rutin dan biasanya diterima langsung oleh takmir yang berada di kantor sekretariat masjid. Penerimaan insidental dapat berupa donasi jamaah atas pelayanan yang diberikan masjid maupun seringkali berupa donasi sukarela. Staf kantor sebagai pihak yang menerima donasi dari jamaah memiliki nota bukti penerimaan yang berisi nama donatur, nominal donasi, keperluan donasi serta tanda tangan donatur dan penerima. Bukti penerimaan tersebut terdiri dari 2 rangkap, rangkap pertama untuk donatur, rangkap dua untuk pembukuan dan disimpan. Selanjutnya, staf kantor akan mencatat transaksi tersebut pada buku penerimaan sesuai peruntukan donasinya lalu memfotokopi bukti tersebut dan melaporkannya kepada Bendahara umum secara harian.

Pendapatan yang diterima oleh masjid tidak dapat langsung digunakan. Dana yang diperoleh masjid tersebut diserahkan ke pihak yayasan kemudian didistribusikan oleh bendahara umum sebagai pemegang wewenang keuangan tertinggi di masjid. Bendahara umum akan menganggarkan kas kecil terlebih sebelum melakukan pendistribusian dana. Kemudian bendahara umum melakukan penyeleksian dan meminta kejelasan peruntukan dana pada pihak yang mengajukan permohonan dana. Jika Bendahara menilai bahwa pengajuan telah jelas sesuai peruntukannya maka dana akan dapat dicairkan. Setelah itu bendahara akan meminta bukti pengeluaran untuk diarsipkan. Hal ini bertujuan sebagai pengendalian internal keuangan masjid.

Proses pencacatan keuangan Masjid Rahmat pada awalnya menggunakan format *Microsoft excel* yang hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran saja namun saat dilakukannya penelitian, Bendahara berinisiatif untuk dapat membuat laporan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, bersama peneliti, bendahara menemukan format *excel* yang sesuai dengan ISAK 35 dari *website Akoontan* namun Bendahara dan takmir hingga saat ini masih beradaptasi dalam memahami penyusunan laporan berdasarkan ISAK 35 sehingga laporan yang dapat dibuat masih belum sempurna. Berdasarkan

penuturan Pak Haji Riduwan, takmir telah melakukan komunikasi dengan ITS untuk penggunaan aplikasi keuangan masjid namun belum diterapkan hingga akhir penelitian ini dilakukan.

Masjid Rahmat sebagai organisasi nonlaba seharusnya dapat membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35 namun hingga saat dilakukannya penelitian ini, Masjid Rahmat hanya dapat membuat laporan neraca, laporan pendapatan komprehensif dan arus kas saja sedangkan laporan perubahan aset netto belum dapat dibuat sebab adanya keterbatasan kemampuan bendahara umum serta bukti kepemilikan aset yang masih sulit untuk dicari. Laporan keuangan tersebut hanya diberikan kepada internal pengurus tiap bulannya sedangkan jamaah hanya mendapat laporan secara lisan setiap sebelum salat Jumat dan hanya berisi pemasukan kotak infak Jumat serta pengeluaran operasional selama satu pekan.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dokumen laporan keuangan yang didapat dari Bendahara Umum. Seperti yang telah dijabarkan oleh peneliti pada paragraf sebelumnya bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh masjid Rahmat secara lengkap adalah Penghasilan Komprehensif, Neraca, dan Arus Kas. Berikut isi laporan Penghasilan Komprehensif masjid periode Januari – Mei 2022:

Yayasan Masjid Rahmat
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
2022

	TANPA PEMBATASAN	PEMBATASAN
PENDAPATAN		
Donasi/Zakat/Sumbangan	-	-
Sumbangan Anggota	-	-
Sumbangan Lain-Lain	-	-
Infak dan Shodaqoh	202,860,000	-
Zakat	-	20,180,000
Donasi Publik	-	-
Donasi Swasta	-	-
Donasi Pemerintah	-	-
Sumbangan Yayasan	-	-
Donasi Online	-	-
Donasi Khusus	24,800,000	-
Hibah	-	-
Pendapatan Sewa Tempat	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-
Pendapatan Bunga	-	-

Total Pendapatan	227,660,000	20,180,000
BEBAN		
Beban Gaji Karyawan	182,000,000	-
Beban Tunjangan dan Komisi Karyawan	-	-
Beban Ustad	22,575,000	-
Beban Perlengkapan	1,175,000	-
Beban Asuransi	-	-
Beban Audit	-	-
Beban Pajak	-	-
Beban Keuangan Lain-Lain	5,000,000	-
Beban Rapat	-	-

Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Pelatihan	-	-
Beban Honor Pengurus	8,250,000	-
Beban Hadiah	-	-
Beban Organisasi Lain-Lain	1,660,000	-
Beban Transportasi	264,000	-
Beban Pemasaran	-	-
Beban Konsumsi	1,563,000	-
Beban Karyawan Lain-Lain	1,050,000	-
Beban ATK	90,000	-
Beban Listrik, Telepon dan Air	10,753,676	-
Beban Internet	1,500,000	-
Beban Ongkos Kirim	-	-
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	4,590,000	-
Beban Operasional Lain-Lain	3,446,000	-
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	-	-
Beban Sewa	-	-
Beban Kerugian Penjualan Aset	-	-
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	-	-
Beban Penyusutan Inventaris Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan Inventaris Elektronik	-	-
Beban Penyusutan Inventaris Tanah dan Bangunan	-	-
Total Beban	243,916,676	-
SURPLUS (DEFISIT)	(16,256,676)	20,180,000

Gambar 4.1

Laporan Penghasilan Komprehensif Januari – Mei 2022

Berdasarkan Laporan Penghasilan Komprehensif di atas, pendapatan utama dari Masjid Rahmat bersumber dari infak dan sedekah. Selain itu, terdapat pula aset yang dibatasi penggunaannya yaitu zakat Idul fitri. Pada sisi Beban, ditemukan bahwa Beban Gaji Karyawan merupakan komponen yang paling besar. Menurut wawancara peneliti dengan Pak Haji Riduwan, jumlah takmir yang menerima gaji sekitar belasan orang. Selain gaji berupa uang, berdasarkan wawancara dengan Pak Besar, beberapa takmir yang dinilai kurang mampu secara ekonomi juga mendapat beras setiap Kamis yang dapat diambil melalui Bank Beras di ruang kerja Bendahara.

Jika kembali melihat laporan di atas, terlihat bahwa terjadi defisit keuangan pada Masjid Rahmat. Alasan defisit keuangan tersebut adalah belum dimasukkannya hasil parkir dan infak Jumat sejak April oleh Bendahara. Saat peneliti menanyakan hal tersebut, Bendahara menjawab bahwa memang belum di-*entry* ke *excel* tapi telah tercatat secara manual. Selain itu, terdapat transaksi lain yang belum di-*entry* oleh bendahara seperti Beban Listrik, Air, dan Telepon sejak Maret. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan Arus Kas Bulanan bagian aktivitas operasi berikut:

 LAPORAN ARUS KAS					
	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022
AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Masuk					
Donasi/Zakat/Sumbangan	-	-	-	-	-
Sumbangan Anggota	-	-	-	-	-
Sumbangan Lain-Lain	-	-	-	-	-
Infaq dan Shodaqoh	58,805,000	44,608,000	47,899,000	18,379,000	18,419,000
Zakat	-	-	-	-	20,180,000
Donasi Publik	-	-	-	-	-
Donasi Swasta	-	-	-	-	-
Donasi Pemerintah	-	-	-	-	-
Sumbangan Yayasan	-	-	-	-	-
Donasi Online	-	-	-	-	-
Donasi Khusus	-	-	-	-	24,800,000
Hibah	-	-	-	-	-
Pendapatan Sewa Tempat	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-
Piutang Pinjaman	-	-	-	-	-
Piutang SPP	-	-	-	-	-
Piutang Pinjaman Karyawan	-	-	-	-	-
Piutang Usaha	-	-	-	-	-
Piutang Donasi/Sumbangan	-	-	-	-	-
Utang PPN	-	-	-	-	-
Utang PPH	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima di Muka	-	-	-	-	-
Total Arus Kas Masuk	58,805,000	44,608,000	47,899,000	18,379,000	63,399,000
Arus Kas Keluar					
Pengeluaran dibayar di Muka	-	-	-	-	-
Piutang Pinjaman	-	-	-	-	-
Piutang SPP	-	-	-	-	-
Utang PPN	-	-	-	-	-
Utang PPH	-	-	-	-	-
Piutang Pinjaman Karyawan	-	-	-	-	-
Beban Gaji Karyawan	36,400,000	36,400,000	36,400,000	36,400,000	36,400,000
Beban Tunjangan dan Komisi Karyawan	-	-	-	-	-
Beban Ustad	4,300,000	4,300,000	4,300,000	5,375,000	4,300,000
Beban Perlengkapan	475,000	105,000	-	575,000	20,000
Beban Asuransi	-	-	-	-	-
Beban Audit	-	-	-	-	-
Beban Pajak	-	-	-	-	-
Beban Keuangan Lain-Lain	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Beban Rapat	-	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-
Beban Pelatihan	-	-	-	-	-
Beban Honor Pengurus	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
Beban Hadiah	-	-	-	-	-
Beban Organisasi Lain-Lain	1,050,000	120,000	220,000	150,000	120,000
Beban Transportasi	264,000	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-	-	-
Beban Kerugian Penjualan Aset	-	-	-	-	-
Total Arus Kas Keluar	55,099,889	50,158,787	45,480,000	48,653,000	44,525,000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	3,705,111	(5,550,787)	2,419,000	(30,274,000)	18,874,000

Gambar 4.2

Laporan Arus Kas Bagian Aktivitas Operasi Masjid Rahmat Januari – Mei 2022

Berdasarkan laporan di atas, arus kas yang terjadi dan tercatat pada masjid Rahmat hanyalah dari aktivitas operasional sedangkan aktivitas

investasi dan pendanaan kosong sebab bendahara umum tidak memiliki catatan terkait aktivitas tersebut. Selama penelitian dilakukan tidak ditemukan adanya penjualan aset serta semua kegiatan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas yang ada di masjid Rahmat dilakukan secara kas.

Proses penyusunan laporan tersebut masih terkendala sumber daya manusia. Pada masjid Rahmat, kegiatan pencatatan hingga pelaporan keuangannya hanya dilakukan oleh Bendahara Umum dan staf kantor. Bendahara umum memiliki peran sangat vital pada keuangan Masjid Rahmat Surabaya sebab Bendahara Umum bertugas dalam pencatatan, pelaporan keuangan, pengawasan transaksi dan penyimpanan dana Masjid. Dalam menjalankan perannya, Bendahara Umum dibantu oleh staf kantor. Dalam kepengurusan masjid, sebenarnya juga terdapat Bendahara 2 selain Bendahara Umum tapi pada praktiknya Bendahara tersebut jarang bertugas sehingga sering digantikan oleh staf kantor. Staf kantor berperan mengelola kas kecil dan mencatat penerimaan langsung dari jamaah. Namun demikian terdapat masalah baru yang muncul sebab staf kantor tidak memiliki pengetahuan mengenai akuntansi serta tidak lihai dalam mengoperasikan komputer sehingga berdampak pada lemahnya akuntabilitas keuangan masjid. Hal itu menjadi perhatian bendahara saat diwawancara oleh peneliti terkait bagaimana meningkatkan akuntabilitas masjid.

“SDM. Setidaknya SDM itu harus paham komputer, kan sekarang sudah jamannya komputerisasi. Kalau kita belum bisa sampai itu nanti akan sulit. Saya inginnya ada pelatihan buat pengurus untuk penggunaan komputer. Nah kalau sudah bisa, ya kita akan lebih mudah membuat laporannya.” (**Pak Besar, Bendahara Umum**)

Selain itu, takmir masjid Rahmat belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan pembukuan untuk takmir. Hal tersebut semakin memperkuat temuan berbagai penelitian terdahulu bahwa aspek sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam proses akuntansi masjid. Kendala tersebut juga terjadi pada Masjid Darussalam (Farokhi, 2017), Masjid Raudhatul Irfan (Ismatullah,

2018), Masjid Baburrahmah (Sari, 2018), Masjid Agung Lamongan (Aisyah, 2019), dan Masjid Al Falah (Fanani, 2020).

Secara keseluruhan, dimensi akuntabilitas keuangan masjid Rahmat masih belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya profesionalitas dalam proses penganggaran, pengawasan, pelaporan keuangan. Penganggaran program pada masjid Rahmat yang sering tidak sesuai sebab adanya keterlambatan penetapan program tahunan. Selain itu, penetapan anggaran Kas Kecil yang dilakukan tiap pekan tidak memiliki catatan yang jelas, baik jumlah yang dianggarkan maupun pengeluarannya. Takmir Masjid Rahmat juga sering terlambat memindah data keuangan dari catatan manual ke *excel* sehingga sering kali tidak tercantum di laporan keuangan. Selain itu, terdapat pula kendala lain seperti data aset yang sulit dicari, SOP keuangan yang belum jelas, tidak berfungsinya jabatan Wakil Bendahara, serta rendahnya kemampuan SDM dalam melaporkan keuangan dan tidak adanya pelatihan terkait kemampuan keuangan. Sebagai upaya untuk memperbaiki hal tersebut, takmir, bendahara akan mencoba membuat SOP keuangan yang lebih jelas dan tertulis serta bersedia berkonsultasi dengan pihak yang memahami laporan keuangan nonlaba jika terdapat kesulitan mengenai pelaporan keuangan masjid..

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai ISAK 35 memerlukan orang yang kompeten di bidang akuntansi. Kompetensi akuntansi hanya bisa didapat melalui pembinaan oleh profesional. Pembinaan ini merupakan implementasi sifat *fathanah* yang berarti memaksimalkan potensi akal manusia untuk menjalankan perannya di bumi. Masjid Rahmat memahami bahwa kualitas laporan keuangan yang baik adalah kewajiban. Menanggapi hal tersebut, Masjid Rahmat menerapkannya dengan memilih orang yang berpengalaman di bidang keuangan sebagai bendahara umum. Meski begitu, Pembinaan kemampuan akuntansi masih harus dilakukan sebab diketahui bahwa bendahara tidak pernah mengenyam pendidikan akuntansi atau pembukuan secara formal namun hingga saat ini masjid Rahmat belum pernah melakukan pembinaan kepada takmir yang bertugas di bidang keuangan. Hal ini kurang

sesuai dengan yang proposisi yang dilakukan peneliti yaitu (P7) Penerapan sifat *fathanah* melalui pembinaan kompetensi takmir terkait pengelolaan organisasi dan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan masjid.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas Masjid Rahmat jika ditinjau dari dimensi, mekanisme akuntabilitas dan penerapan sifat rasul, belum berjalan baik sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Berikut ulasan rinci mengenai kesimpulan tersebut:

1. Peninjauan dimensi Akuntabilitas spiritual Masjid Rahmat menunjukkan hasil yang sudah baik. Wujud dari akuntabilitas spiritual Masjid Rahmat dapat dilihat melalui adanya pembinaan keorganisasian dan spiritualitas oleh dewan pembina serta niat ikhlas takmir untuk memakmurkan masjid serta pemahaman pentingnya pelaporan dan pengawasan keuangan yang jujur sebagai bentuk dakwah melalui akhlak yang baik.
2. Peninjauan dimensi Akuntabilitas hukum Masjid Rahmat menunjukkan hasil yang cukup baik. Wujud akuntabilitas tersebut dapat dilihat melalui sikap takmir yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum dengan memerhatikan syariat Islam yang sesuai *ahlussunah wal jamaah* dan ideologi Pancasila, tidak ditemuinya kasus hukum di masjid Rahmat, mekanisme *self-regulating* yang berjalan dengan baik.
3. Peninjauan dimensi Akuntabilitas Program Masjid Rahmat menunjukkan hasil yang kurang baik. Wujud akuntabilitas tersebut dapat dilihat melalui tidak ditemukannya indikator dan target waktu yang jelas dalam penyusunan program, tidak adanya pelatihan kreativitas bagi takmir serta remaja masjid yang pasif. Meskipun jika dilihat dari keterbukaan dan publikasi masjid Rahmat kepada masyarakat, nilainya cukup baik.
4. Peninjauan dimensi Akuntabilitas Proses Masjid Rahmat menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini ditinjau dari tata kelola organisasi yang

tidak didasarkan pada AD/ART, tidak tersedianya SOP tertulis, sistem pengarsipan yang masih bergantung pada dokumen cetak, informasi keuangan yang belum dapat diakses secara *realtime*, dan kompetensi takmir yang tidak sesuai dengan jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Masjid Rahmat telah membuka kerja sama dengan pihak ITS terkait pembuatan sistem informasi akuntansi dan mempelajari pelaporan yang sesuai ISAK 35.

5. Peninjauan dimensi akuntabilitas keuangan masjid Rahmat masih kurang baik. Hal ini dilihat dari penganggaran yang sering tidak sesuai, pencatatan transaksi secara manual, pemindahan catatan manual ke *excel* yang sering terlambat, pelaporan keuangan kepada jamaah yang hanya berupa lisan, tidak adanya audit baik internal maupun eksternal, tidak tersedianya dokumen terkait aset, jabatan wakil bendahara yang tidak berfungsi, serta rendahnya kemampuan SDM terkait pelaporan keuangan ISAK 35.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, berikut saran yang diajukan untuk takmir Masjid Rahmat:

1. Takmir Masjid Rahmat hendaknya memberikan batasan waktu dan indikator yang jelas dalam penetapan program tahunan. Selain itu, Diperlukan semacam daftar capaian program untuk takmir dan publikasi *timeline* program masjid untuk satu tahun berjalan. Hal tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas program yang ada dan diharapkan dapat mengontrol kualitas program serta meningkatkan partisipasi jamaah.
2. Takmir Masjid Rahmat sebaiknya memperbaiki kualitas komunikasi antara pengurus dan dewan pembina agar terbentuk alur wewenang dan tanggung jawab serta standar operasional yang lebih jelas. Pembatasan wewenang terutama terkait keuangan, dimana pihak yang melaporkan keuangan harus dibedakan dengan pihak yang memberikan otorisasi dan menyimpan dana. Selain itu, melakukan pengarsipan yang lebih rapi dan

terkomputerisasi agar memudahkan pencarian dokumen. Hal tersebut akan berimplikasi pada tata kelola masjid yang lebih efisien.

3. Takmir hendaknya melakukan penganggaran dan melaporkan realisasinya dengan yang lebih jelas. Selain itu, takmir hendaknya melakukan *entry* keuangan dari catatan manual staf kantor ke *excel* setidaknya tiap pekan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya transaksi tidak tercatat pada laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan.
4. Takmir Masjid Rahmat harus memperhatikan pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan yang baik adalah yang sesuai ISAK 35. Oleh sebab itu, Takmir seharusnya memberikan pelatihan kompetensi keuangan terutama pada petugas yang mengurus keuangan masjid. Selain itu, pelaporan keuangan harus diungkapkan dengan lebih transparan pada jamaah, setidaknya terdapat laporan tertulis yang mudah diakses oleh jamaah di masjid atau jika memungkinkan memiliki *website* yang terintegrasi secara *realtime* dengan informasi keuangan yang dimiliki bendahara. Setelah laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 maka akan dapat dilakukan audit eksternal. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan Masjid Rahmat.

Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yang berbeda. Peneliti bisa meneliti masjid dengan tipologi yang berbeda seperti masjid jami' ataupun masjid di tempat publik. Hal tersebut untuk memberikan gambaran bagaimana akuntabilitas pada masjid dengan tipologi yang berbeda karena setiap masjid memiliki perbedaan masing – masing.
2. Penelitian ini berfokus terhadap satu masjid yakni Masjid Rahmat. Oleh sebab itu, Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian *multiple case study* dengan membandingkan dua atau lebih subjek dengan unit analisis yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282 Adz-Dzariyat ayat 56; Surat Al Anfaal ayat 47

Abdullah (2009). Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.

Aisyah, N. (2019). *Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andarsari, P. R.. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, Vol. 1, No. 2

Askary, S., & Clarke, F. (1997). Accounting in thr Koranic Verses, Proceedings of International Conference, The Vehicle for Exploring and Implementing Shariah Islami'ah in Accounting, Commerce and Finance. *Macarthur: University of Western Sydney*.

Bastian, I. 2005. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

Basuki. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi Dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Surabaya: Airlangga University Press

Faizal, A. (2018, Juli 18). Gelapkan Uang Infak Rp 266 Juta, Takmir Masjid Divonis 2,5 Tahun Penjara. *Kompas*. Diambil dari <https://surabaya.kompas.com/read/2018/07/18/18330771/gelapkan-uang-infak-rp-266-juta-takmir-masjid-divonis-25-tahun-penjara>.

Fajriah, I. M. D., Anshor, M. U., Riyadi, D. S., Rosyidah, I., Yani, A., Kustini, Burhani, H., Fitriani, R. N.. 2020. Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat. Jakarta: Litbangdiklat Press.

Fanani, M. B. U. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan. Universitas Airlangga.

Fikri, A., Sudarma, M., Sukoharsono, E. G., Purnomosidhi, B., & Triyuwono, I. 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*, 13.

- Fitria, Y. (2017). Akuntabilitas pada Organisasi Religi ; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntabel*, 14(1), 38–45.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 485-497.
- Kholmi, M. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, 15(1), 63–73.
- Kismawadi, E. R., Muddatstsir, U. D. Al, & Sawarjuwono, T. (2018). Accountability And Innovative Financial Reporting To The Mosque. *The International Journal Of Organizational Innovation*, 10(4), 101–110.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mufidah, E. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Syariah. Universitas Airlangga.
- Mohammed, I. , Aziz, N. , Masrek, M. , & Daud, N. (2014). Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145.
- Adil, M.A.M., MohdSanusi, Z., Jaafar, N.A., Khalid, M.M, and Abd Aziz, A. (2013). Financial Management Practices of Mosques in Malaysia. From <http://ari.uitm.edu.my/2012/iiafc-2012/list-of-paperspresented/1028financial-management-practices-of-mosques-in-malaysia.html>
- Padmasari, S. I. (2018, November 5). Terlibat kasus korupsi dana hibah, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo ditahan. *Merdeka*. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-kasus-korupsi-dana-hibah-ketua-yayasan-masjid-agung-palopo-ditahan.html>
- Pandini, D. I. (2013). *Analisis Praktek Akuntabilitas dan Wujud Transparansi di Organisasi Masjid (Studi Kasus di Masjid Raya Darul Amal Salatiga)*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Purnamasari, D. M. (2020) Soal Penggelapan Dana Infak Masjid Raya Sumbar, DMI Nilai Ironis. *Kompas*. Diambil dari

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/17114221/soal-penggelapan-dana-infak-masjid-raja-sumbar-dmi-nilai-ironis>
- Pusdiklatwas BPKP. (2007). Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jakarta*.
- Qolbi, S. (2015). Studi Fenomenologi Akuntabilitas dalam Perspektif Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. *Universitas Airlangga*.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 1*. Jakarta: Gema insani press.
- Randa, F. 2011. Rekonstruksi Konsep Akuntansi Organisasi Gereja. Jurnal Simposium Akuntansi. Vol.14. No.8
- Riani, A. (2019, Januari 5). Deretan Keistimewaan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta. *Liputan 6*. Diambil dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3881578/deretan-keistimewaan-masjid-jogokariyan-di-yogyakarta>
- Ruknuddin, M. N. I. (2016). *Akuntabilitas Keuangan Masjid dalam Perspektif Islam*. Universitas Hasanuddin.
- Simanjuntak, D. A., & Januarsy, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80.
- Sitompul, M. S., Nurlaila, & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Human Falah*, 3(2), 203–225.
- Trow, M. (1996). Trust, Markets And Accountability In Higher Education: A Comparative Perspective. *Higher Education Policy*, 9(4), 309–324.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research From Start to Finish*. New York: A Division of Guilford Publications, Inc.

DAFTAR LAMPIRAN**Lampiran 1: Transkrip Wawancara**

Transkrip Wawancara

Nama Lengkap : Riduwan Aziz, S.Ag

Jabatan : Sekretaris Umum Masjid Rahmat Surabaya

Tempat : Aula Lantai 2 Masjid Rahmat Surabaya

Tanggal : Jumat, 1 April 2022

Waktu : 10.29 WIB

Keterangan : P (Peneliti), N (Narasumber)

1	P	Assalamualaikum Pak. Saya yoga dari Unair ingin wawancara terkait akuntabilitas di sini (Masjid Rahmat Surabaya). Kalau boleh tahu dengan bapak siapa, <i>nggih?</i>	
	N	Riduwan... Riduwan... Sekretaris Umum Masjid Rahmat Kembang Kuning	
	P	Sudah berapa lama di Masjid Rahmat Pak?	
	N	Saya kisaran sudah 15 tahun	
	P	Kalau sebagai sekretaris itu sudah berapa lama Pak?	
	N	Sekretaris baru kisaran ya.. 9 tahunan	
	P	Untuk pemilihannya itu bagaimana ya pak?	
	N	Dipilihnya melalui rapat Yayasan.. Rapat Pengurus Yayasan.	
	P	Rapatnya itu setiap tahun atau bagaimana pak?	
	N	Setiap satu periode sekali. Satu periode itu lima tahun. Baru dirapatkan kembali untuk penyusunan pengurus yang baru.	
	P	Sebagai Sekretaris, jobdesc atau pekerjaan yang dilakukan apa saja pak?	

	N	Pekerjaan sekertaris, satu, membuat program bersama dengan pengurus yang lain, mencatat kegiatan, sekaligus mengawasi pekerjaan kantor.	
	P	Begini pak. Bapak dulu menerima pekerjaan di Masjid Rahmat ini awalnya seperti apa pak? Yang memotivasi Pak Ridwan?	
	N	Awal kerja sebelumnya kita ini menjadi remaja masjid Surabaya, bukan remaja Masjid Rahmat, tetapi ada (menjadi anggota) koordinator remaja masjid Surabaya yang berkantor di sini (Masjid Rahmat). Kemudian berubah (berlanjut) menjadi Forum Silaturahmi Remaja Masjid Jawa Timur. Waktu itu di Islamic Center. Karena <i>basic</i> awal itu di Masjid Rahmat kita banyak kenal dengan Masjid Rahmat. Setelah itu kita dimasukkan menjadi takmir. Waktu itu sebagai seksi ketakmiran Masjid Rahmat (selama) satu periode.	
	P	Nah, apakah bekerja sebagai sekretaris ini sesuai dengan pendidikan Pak Ridwan?	
	N	Untuk pendidikan, tentunya tidak. Cuma pengalaman di organisasi saya sering (ditunjuk) sebagai sekretaris atau wakil sekretaris. Kalau <i>basic</i> saya adalah sarjana dakwah di IAIN Sunan Ampel.	
	P	Bagaimana Pak Ridwan memahami amanah sebagai takmir?	
	N	Kita melaksanakan sesuai dengan fungsi tugas ketakmiran pada saat itu. Jadi kerja kita ya bagaimana bisa memakmurkan masjid, kegiatannya berjalan, masyarakat dan jamaah mendukung, dan hasil kegiatan bisa bermanfaat bagi jamaah.	
	P	Kalau dikaitkan dengan nilai sifat rasul dalam pengelolaan masjid itu bagaimana pak?	
	N	Itu (nilai sifat rasul) memang harus dimiliki oleh seorang pengurus atau takmir. Jadi takmir itu harus <i>shiddiq</i> , bisa dipercaya. (Lalu) Bagaimana kita bisa dipercaya? Misalkan masalah keuangan kita harus menyampaikan informasi (secara jujur) kepada masyarakat. <i>Fathanah</i> , cerdas, ya harus inovatif dalam mengadakan kegiatan. Tabligh, menyampaikan, ya semua program kita sampaikan baik itu (kepada) internal maupun eksternal. Amanah ya tentunya berkewajiban menjaga <i>marwah</i> Masjid Rahmat ini bisa dipercaya ke masyarakat dan jamaah khususnya di Surabaya.	
	P	Apakah ada landasan hukum dalam pengelolaan masjid?	
	N	Untuk landasan hukum kita kepengurusan sudah melalui (SK) Menkumham. Setiap kali periodisasi kita laporkan dan kita buat (ajukan SK) Menkumham baru sebagai pengurus.	

		Itu yang menjadi landasan kita dalam melaksanakan tugas masjid Rahmat.	
	P	Berarti di sini kebanyakan mengadopsi peraturan dari Menkumham ya pak? Atau ada yang dibuat sendiri dari pihak takmir?	
	N	Nah mengadopsi dari akta notaris yang sudah ada. Akta Notaris itu ada bidang-bidang terkait pengelolaan masjid. Istilahnya AD/ART.	
	P	Nah terkait AD/ART pak, kan ada SOP yang melengkapi AD/ART tersebut?	
	N	Selama ini tidak ada SOP yang jelas (tertulis). SOP di masjid kita belum menerapkannya. Mungkin kedepannya akan merancang dan menerapkan SOP. Sebab SDM dari kepengurusan takmir masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tentunya harus diimbangi dengan pengembangan SDM.	Sambil tersenyum
	P	Nah kan ada beberapa peraturan terkait pengelolaan masjid, seperti larangan forum politik di dalam masjid atau peraturan terkait speaker. bagaimana sikap pak Ridwan terkait hal tersebut?	
	N	Kita tetap menjaga agar tidak menyalahi peraturan tersebut. Kita dalam mengelola masjid harus mengutamakan keamanan. Aman sesuai regulasi, penggunaan keuangan dan secara hukum tidak menyalahi aturan. Kemudian aman syar'i yang juga berarti menjaga nilai-nilai keislaman masjid yang sesuai ahlussunnah wal jamaah dan dalam pelaksanaan kita mengikuti Nahdhlatur Ulama. Lalu harus ada aman NKRI yaitu kita harus menjauhi mereka yang memiliki aliran-aliran keras dan bertentangan dengan Pancasila.	
	P	Apakah pernah terjadi kasus hukum di masjid ini?	
	N	Dulu ada tapi dari internal sendiri, tentang penguasaan radio, dulu atas nama (masjid) Rahmat ternyata dari keluarga pengurus ada yang mengklaim bahwa itu milik keluarga. Sempat ke pengadilan juga dan cukup lama tapi saya waktu itu belum masuk sini.	
	P	Kalau yang terkait keuangan apakah ada pak?	
	N	Terkait keuangan selama ini tidak ada cuma laporannya saja kurang, kurang kredibel atau <i>yok opo ngono</i> .	Sedikit berhenti sejenak saat menjelaskan tentang laporan keuangan.
	P	Kalau di sini apakah ada sistem hukuman kalau ada takmir yang melanggar atau reward untuk karyawan yang berprestasi?	
	N	Kalau <i>reward</i> kami tidak ada, kami tidak memberikan. Kalau hukuman untuk kesalahan-kesalahan itu sebatas kita ingatkan	

		karena di sini staf-stafnya yang tua itu banyak. Gaji sementara itu tidak sesuai. Di sini ini ukurannya perjuangan, jadi gaji itu perjuangan, tidak ada gaji yang profesional sehingga sangat minimnya gaji menyebabkan kita tidak bisa menekan mereka, (kita) cuma dapat mengarahkan saja.	
	P	Dalam menetapkan kebijakan, apakah ditetapkan takmir sendiri? Atau bagaimana pak?	
	N	Untuk hal-hal kecil biasanya ditetapkan sendiri tapi kalau hal-hal besar seperti menyangkut keuangan yang cukup banyak itu dimusyawarahkan. Nanti dimusyawarahkan pimpinan yaitu ketua sekretaris, bendahara.	
	P	Itu musyawarahnya biasanya periodenya berapa kali dalam setahun?	
	N	Di dalam setahun ya tinggal ada masalahnya muncul seperti apa. Kalau ada masalah muncul ya kalau bisa kita tangani sendiri ya kita tangani sendiri. Kalau tidak bisa ya dimusyawarahkan.	
	P	Sebagai sekretaris, peran pak Ridwan itu bagaimana dalam penetapan kebijakan?	
	N	Seringkali kita membuat surat keputusan. Namanya SK, karena ini bentuk yayasan dan memiliki lembaga pendidikan TK, SD, SMP. Dari situ kita membuat SK terutama SK pengangkatan baik guru yang tidak tetap menjadi guru tetap maupun pengangkatan kepala sekolah baru.	
	P	Apakah di sini perencanaan kegiatan itu direncanakan takmir sendiri?	
	N	Itu program tahunan. Jadi kita buat program sendiri namun program itu kadangkala tidak terlaksana karena beberapa kendala. Rutinitas atau program yang rutin itu kita rapatkan setahun sekali cuma targetnya kita belum bisa menarget. Biasanya akhir Desember.	
	P	Kalau ada pihak eksternal ingin mengadakan kegiatan di masjid itu bagaimana pak?	
	N	Bisa langsung menghubungi kami (di kantor). Contohnya kegiatan satu Muharram ada pihak luar yang ingin mengadakan acara di masjid ya kita menyesuaikan dengan keadaan. Untuk perizinannya, pihak ketiga harus membuat surat permohonan dan dibawa ke sini. Kemudian kita lihat dan seleksi kelayakan dan kejelasan organisasi tersebut. Kita pastikan jangan sampai ada organisasi terlarang mengadakan kegiatan di sini. Banyak yang mengusulkan banyak juga yang kita tolak karena tidak sepaham dengan kita.	
	P	Nah kalau dari masjid sendiri, pernahkah ada kolaborasi dengan pihak eksternal?	

	N	Ada, malah sering. Misalkan dengan Indosiar. Dulu Indosiar mengadakan kegiatan pengajian di sini. Kita mendatangkan banyak orang sampai lima ratus orang untuk kita undang ke sini. Dulu juga pernah ada LSM. Pokoknya itu bermanfaat untuk masyarakat dan jamaah, kita oke. Mereka datang sepaham dengan kita.	
	P	Selama ini publikasi kegiatannya itu bagaimana pak?	
	N	Banyak sekali. Kita ada Instagram, dan jalur-jalur TI serta melalui kelompok-kelompok, grup-grup WA. Selain itu, juga diumumkan melalui <i>banner</i> dan spanduk. Oh iya lewat radio (masjid).	
	P	Di sini apakah ada program pembinaan kreativitas dan kompetensi untuk takmir terkait kemampuan organisasi?	
	N	Untuk saat ini belum ada. Istilahnya peningkatan SDM internal itu belum ada. Kedepannya akan diadakan audit dengan mengundang auditor eksternal sehingga kita tahu kesalahan kita secara syar'i nya bagaimana sebab ini uang masjid.	
	P	Bagaimana peran remaja masjid dalam pengelolaan masjid?	
	N	Remaja masjidnya ada cuma tidak berjalan sesuai program. Mereka hanya bersifat insidentil. Misal saat Ramadan kita kerahkan untuk membantu kegiatan Ramadan, seperti menyiapkan takjil, membuat proposal, dan lain lain.	
	P	Sebelumnya Pak Ridwan menyebutkan bahwa masjid ini memiliki sekolah dan radio, pengelolaannya itu oleh takmir atau diserahkan ke pihak lain?	
	N	Kalau sekolah kita berikan sepenuhnya kepada sekolah namun dalam kepengurusan yayasan terdapat seksi pendidikan yang mengawasi dan memberikan laporan terkait pengelolaan sekolah kepada yayasan sehingga jika ada permasalahan, maka yayasan dapat mengeksekusinya.	
	P	Bagaimana bentuk keterlibatan jamaah dalam kegiatan masjid?	
	N	Karena masyarakat sekitar ini masih <i>abangan</i> , tidak mengenal islam secara keseluruhan, sehingga respons masyarakat terkait kegiatan masjid masih kurang dan agak enggan mengikuti kegiatan di masjid. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sini, kita masih belum menemukan formulanya namun jika kita ada kegiatan pembagian sembako itu langsung <i>gruduk</i> (bersemangat). Kalau ada kegiatan kerja bakti bersama seperti pagi tadi dengan KODAM V Brawijaya itu ikut rutin tiap tahun.	
	P	Untuk evaluasi kebijakan dan kegiatan itu dilaksanakannya kapan pak?	

	N	Akhir tahun itu dilaksanakan evaluasi kemudian kita perumusan program	
	P	Apakah melibatkan masyarakat sekitar dalam evaluasi dan perumusan program?	
	N	Tidak. Hanya pengurus saja. Kalau kepanitiaan, hanya internal kepanitiaannya saja.	
	P	Bagaimana prosedur pendelegasian tugas di masjid Rahmat?	
	N	Pertama kita informasikan ke ketua umum terkait kegiatan atau acara. Setelah itu, kita diskusikan siapa yang datang dengan menimbang jenis dan bentuk undangannya. Kalau tujuannya untuk mengundang pengurus harian, ya tidak kita delegasikan ke staf.	
	P	Bagaimana keterlibatan takmir dengan organisasi dewan masjid? serta bagaimana hubungan dengan masjid-masjid di daerah sekitar masjid rahmat?	
	N	Kita sering mengikuti kegiatan dewan masjid. Selain itu kita juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masjid sekitar. Kita sering membantu masjid sekitar tidak hanya melalui publikasi, tapi juga secara finansial.	
	P	Bagaimana proses pelaporan keuangan di masjid rahmat?	
	N	Hingga saat ini kita masih belum bisa membuat yang sesuai aturan yang ada. Laporan yang saat ini sangat global, hanya melihat pemasukan dan pengeluaran saja sehingga dalam penelusuran dananya kita masih sulit memastikan peruntukkannya. Kita menentukan program tapi jarang sekali dianggarkan secara detail menggunakan Rencana Anggaran Program.	
	P	Apakah laporan keuangan masjid dan sekolah digabung?	
	N	Laporan keuangan masjid dan sekolah dibedakan. Jika sekolah menghasilkan lebih dari biaya operasional maka surplusnya nanti dimasukkan ke yayasan.	
	P	Bagaimana periode pelaporan keuangan dilakukan selama ini?	
	N	Periodenya 3 bulan sekali tapi seringnya enam bulan sekali.	
	P	Laporan keuangan yang dibuat ditujukan kepada siapa saja?	
	N	Kalau sekolah dilaporkan ke yayasan. Kemudian dari yayasan (masjid) kita sampaikan ke jamaah. Itupun tidak sesuai dengan tulisan (catatan), kita hanya melaporkan secara lisan berupa pemasukan dan pengeluaran tiap jumat. Ini yang kami rasa tidak <i>fair</i> sehingga memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Akhirnya menimbulkan stigma bahwa masjid kurang terbuka.	
	P	Lalu bagaimana solusi dari masjid terkait hal ini?	
	N	Kalau ada yang bertanya (tentang informasi keuangan) kita buka catatannya.	

	P	Apakah di web masjid laporan keuangannya dapat diakses?	
	N	Belum ada. Kita berencana membeli program agar segera dapat menampilkan laporan keuangan yang dapat selalu diakses.	
	P	Siapa saja dari yayasan yang mendapat laporan keuangan tersebut?	
	N	Hampir seluruh pengurus. Biasanya diberikan lewat WA atau lewat fotokopi (laporan keuangan) maupun lewat forum rapat.	
	P	Menurut pak Riduwan, apa yang dapat ditingkatkan terkait akuntabilitas masjid Rahmat?	
	N	Pelaporan keuangan harus dibuat lebih terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mendukung dengan penuh segala kegiatan masjid namun terus terang jika laporan tidak terbuka maka masyarakat tidak akan <i>interested</i> dengan masjid. Nah untuk membuat laporan itu kita harus profesional. Kami beberapa waktu lalu juga ditawarkan program keuangan masjid dari anak ITS.	
	P	Saya kira cukup demikian. <i>Matur nuwun nggih</i> pak sudah mau meluangkan waktunya. Wassalamu'alaikum.	
	N	Sama sama mas yoga. Wa'alaikumsalaam.	

Wawancara lain yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2022

	P	Apa yang memotivasi pak Riduwan untuk menerima amanah di masjid Rahmat?	
	N	Satu ya kita berusaha maksimal untuk mengembangkan masjid rahmat dalam seluruh bidang sehingga masjid Rahmat menjadi ikon kota Surabaya. Kedua tentunya harus diiringi nilai perjuangan dan keikhlasan. Kalau visi misi kemasjidan itu tidak ada nilai perjuangan dan keikhlasan <i>wis</i> tidak mungkin tercapai dengan baik	
	P	Bagaimana program untuk tiap seksi di masjid Rahmat disusun? Apakah ada batas waktu penentuannya? Siapa yang menjadi penanggungjawabnya?	
	N	Program disusun pada akhir bulan Desember oleh internal pengurus dan penanggungjawabnya dipilih dari tiap seksi. Untuk batas waktunya sih sementara ini tidak ada.	

Transkrip Wawancara

Nama Lengkap : Besar Soeripno,S.H.

Jabatan : Bendahara Umum Masjid Rahmat Surabaya

Tempat : Ruang Kerja Bendahara Masjid Rahmat Surabaya

Tanggal : Jumat, 1 April 2022

Waktu : 14.39 WIB

Keterangan : P (Peneliti), N (Narasumber)

1.	P	Pertama-tama ini dengan Bapak <i>sinten nggih?</i>	
	N	Pak Besar Soeripno	
	P	Di sini (Masjid Rahmat), Pak Besar jabatannya sebagai apa Pak?	
	N	Jabatan saya sebagai bendahara umum	
	P	Kalau boleh tahu, sejak kapan Pak Besar menjabat di sini?	
	N	Sebagai bendahara umum saya baru kepengurusan ini mas. Kebetulan kemarin kepengurusan lama berakhir 2021, kemudian dibentuk kepengurusan baru dengan akta notaris per tanggal 6 Januari 2022. Nah saya baru diangkat sebagai bendahara umum saat itu.	
	P	Berarti sebelumnya belum di sini Pak?	
	N	Belum, saya dulu adalah pensiunan	
	P	Untuk deskripsi pekerjaan sebagai bendahara umum itu apa saja Pak?	
	N	Ya kita hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, terutama pemasukan dari kotak infak setiap Jumat dan kalo ada hari raya lebaran Idul fitri dan Idul adha, juga ada orang yang sedekah. Tapi yang rutin adalah kotak infak setiap Jumat.	
	P	Nah selama di sini apakah ada hambatan Pak sebagai bendahara umum?	
	N	Hambatannya itu kadang-kadang kalau orang-orang yang menghitung itu salah, terus juga ada uang palsu. Uang palsu itu yang mengakibatkan penerimaannya tidak cocok. Adanya uang palsu, setelah diterima, itu membuat harus menyesuaikan catatan kembali.	

	P	Itu yang menghitung biasanya Bapak sendiri atau ada orang lain yang membantu Pak?	
	N	Kotaknya tiap jumat itu dihitung bersama-sama. biasanya ada 5-6 orang	
	P	Kalo yang di depan (infak parkir) itu?	
	N	Infak parkir itu insidentil jadi kita ambil 10 hari sekali. Karena memang hasilnya kan sedikit.	
	P	Kemudian di sini yang memotivasi Pak Besar untuk menerima amanah bendahara umum di Masjid Rahmat ini apa Pak?	
	N	Karena saya itu kebetulan sudah pensiun yang secara umur sudah 60 lebih daripada saya diam di rumah ya agar hidup saya lebih bermanfaat saya mengabdikan di masjid.	
	P	Berarti rumahnya dekat sini ya Pak?	
	N	Ya alhamdulillah ga dekat juga, ya 10 menit lah dari sini kalau naik motor. Tapi bukan itu pertimbangannya, karena memang dari segi umur anak2 saya sudah gede, sudah punya anak semua, sudah punya pekerjaan semua, sudah punya rumah semua, jadi kalau saya harus <i>tenguk tenguk</i> (nganggur) itu gak bisa, lebih baik saya hidup bermanfaat.	
	P	Apakah amanah sebagai bendahara umum sesuai dengan pendidikannya Pak Besar?	
	N	Kalau dikatakan linear juga tidak, saya dulu kerja itu awalnya karena saya punya ijazah komputer. Jadi sekitar tahun 1980 masih tidak ada orang pegang komputer. Saya di tahun itu sudah punya ijazah, tidak lama (setelah memiliki ijazah) cuma ada perusahaan PDAM cari orang yang bisa komputer. Nah saya coba ngelamar di sana alhamdulillah terus (diterima dan) disuruh pegang komputer, karena orang lama-lama yang seumurannya saya pada waktu tidak bisa komputer. Ya waktu itu mungkin gak ada saingannya jadi saya langsung diterima begitu saja. Bahkan yang ngetes saja juga bingung soalnya tidak bisa komputer jadi ngetesnya sejarah. Berhubung saya saya sekolahnya dulu IPA, gak IPS. Jadi yang pelajaran-pelajaran yang sosial itu gak pernah saya baca tapi karena formalitas saja tes itu jadi ya diterima. Lalu begitu saya diterima itu, saya ditempatkan di bagian komputer tapi itu juga tidak lama sebab di perusahaan itu selalu berputar	Beliau sangat bersemangat menjawab pertanyaan tentang pengalaman

		pekerjaannya. Kemudian saya ditempatkan di (bagian) pelanggan. Tidak lama juga, akhirnya saya dipindahkan di (bagian)gudang. Di situ saya juga tidak lama sekitar 3 tahun pindah lagi diberi amanah untuk menjadi kepala bagian kas. Setiap bulan itu untuk menggaji karyawan sejumlah 1500 orang. Tapi ada juga bayar yang lain seperti vendor, dll. Dulu itu rumah saya dekat kampus UWK, saya keluar rumah itu sudah kampus UWK. Disitu daripada saya pulang terus istirahat, saya memilih masuk kuliah sore, saya tertarik di bidang hukum yang akhirnya saya masuk fakultas hukum. 4 tahun kemudian saya di wisuda sebagai sarjana hukum. Tapi ya tidak bermanfaat di kantor karena tidak ada korelasinya dengan perusahaan. Sampai saya lulus itu, saya coba ikut pendidikan advokat. Akhirnya saya lulus juga di Unair. Unair yang belakang itulo. Yang tembus Srikana itu. Saya ujian PKPN di situ, pendidikan advokat. Setelah lulus itu, ya kerja di pengadilan, ada kasus narkoba, pembunuhan, pengeroyokan sampai meninggal. Kalau tadi pertanyaannya apakah pendidikannya sesuai, ya tidak sesuai. Saya pada waktu itu sarjana hukum tapi ditempatkan di bagian kas. Dulu waktu di PDAM itu masih manual, <i>nerima</i> bayar, sekarang kan sudah <i>online</i> tinggal transfer. Dulu tempat saya itu uangnya sampai milyaran. Tapi karena sekarang sudah ada komputerisasi, jadi tenaga manusianya berkurang. Jadi kembali lagi kalau berdasarkan pendidikan saya memang tidak linear tapi kalau berdasarkan pengalaman terkait keuangan saya cukup berpengalaman.	
	P	Kemudian di sini apakah ada pembinaan kompetensi buat takmir terutama tentang kemampuan meliputi pembuatan laporan keuangan?	
	N	Kebetulan petugas kita itu tidak dapat itu, jadi kita terbuka kalau kita ada tawaran untuk <i>training</i> . Kalau keuangan gak ada, paling-paling saya yang disuruh mengikuti. Saya ini kan ya belajar-belajar begitu, kadang kalau <i>nganggur</i> saya lihat Youtube cara belajar accounting, dan tutorial lain.	
	P	Bendaharanya selain Pak Besar apa ada lagi?	

	N	Kalau secara akta kepengurusan ada Bendahara umum dan Bendahara. Bendahara umumnya saya dan bendaharanya teman saya. Saya juga kurang tahu kenapa di akta menyebutnya Bendahara umum dan Bendahara, Sekretaris Umum dan Sekretaris. Kalau yang lama itu Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.	
	P	Tapi Pak Besar kenal dengan Bendahara yang lainnya?	
	N	Kenal. Seperti dulu waktu kepengurusan lama, Bendahara umumnya itu PNS. Dan saya waktu itu cuma bantu-bantu. Tapi sama teman-teman disuruh megang keuangannya. Ya itu akhirnya saya yang sering mengurus itu. Posisi saya bukan bendahara tapi tugasnya seperti bendahara karena mereka PNS tidak bisa sering kesini.	Bendahara yang dimaksud adalah bendahara pada kepengurusan sebelum ini.
	P	Nah tugasnya apakah sama Pak Besar sama bendahara satunya?	
	N	Sebenarnya sama tapi karena mereka tidak bisa komputer, jadi saya yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan bendahara.	“Mereka” pada jawaban ini merujuk pada staf kantor bukan bendahara lainnya.
	P	Bagaimana Pak Besar memahami amanah sebagai takmir dan bagaimana menghayati nilai-nilai keislaman dan sifat rasul seperti shiddiq amanah tabligh fathonah dan penerapannya di pengelolaan masjid?	
	N	Saya belum sampai tingkatan hingga menghayati nilai keislaman secara mendalam. Saya ke Masjid itu tujuannya mencari pahala. Dalam segi agama, kalau yang baik ya saya laksanakan. Misalnya saya harus menyelesaikan tugas saya dengan benar seperti ini, ya saya selesaikan sebaik mungkin. Kalau ditanya tentang tanggung jawab apalagi tentang uang, ya saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Saya simpan yang baik, kalau orang mau mengeluarkan uang itu saya tanya detail bagaimana, siapa yang butuh atau siapa yang menerima, jadi kita dapat mengeluarkan sesuai kebutuhan.	
	P	Kan di masjid ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh takmir, seperti larangan berpolitik	

		dalam masjid ataupun aturan mengenai speaker yang baru saja dikeluarkan, bagaimana pandangan pak Besar mengenai hal tersebut?	
	N	Kalau tentang speaker, dari dulu kita gunakan sesuai kemampuannya. Nah walaupun sekarang ada himbauan dari kementerian agama mengenai batasan volume suara speaker, kita masih belum bisa mengukurnya jadi masih menggunakan speaker seperti biasanya.	
	P	Apakah masyarakat sekitar tidak ada yang merasa terganggu?	
	N	Kebetulan masyarakat sekitar sini tidak ada gereja dan jarang sekali yang nonmuslim jadi ya <i>enjoy</i> saja kalau ada suara agak keras dari masjid. Paling suara keras dari masjid ini cuma azan, setelah azan ya selesai.	
	P	Apakah masjid ini memiliki standar operasional untuk mengatur keuangannya sendiri? Atau kah mengikuti arahan dari pihak eksternal masjid?	
	N	Ya itu kembali lagi, saya itu ingin masjid Rahmat ini memiliki laporan tahunan yang bagus tapi untuk mencapai hal tersebut masih banyak tantangan seperti membuat klasifikasi aset. Jadi saya yang buat sendiri SOPnya tapi cuma di bagian keuangan saja agar memudahkan.	
	P	Apakah di masjid ini pernah ada kasus hukum?	
	N	Kalau saya kan belum sempat mempelajari ini. Mungkin ada tapi saya belum dengar.	
	P	Dalam mengeluarkan dana masjid apakah dicatat dan ada notanya?	
	N	Saya upayakan seperti itu. Uang keluar itu harus dipertanggungjawabkan seperti kalau makan ada bonnya tapi kalau tidak ada (yang tercetak) ya tetap dicatat.	
	P	Apakah ada hukuman bagi pengurus yang melanggar?	
	N	Belum ada SOP untuk memberikan sanksi yang jelas jadi sementara cuma ditegur. Kalau nanti kita sudah susun SOPnya dengan jelas, kita akan beri sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.	
	P	Kalau ada takmir yang berprestasi apakah ada penghargaan dari masjid?	
	N	Selama ini belum ada. Saya berharap jika ada yang punya prestasi yang menonjol maka nanti akan kita buat <i>rewardnya</i> .	

	P	Peran bendahara umum dalam proses pembiayaan kegiatan?	
	N	Kita belum seperti itu. Misal kita mau beli AC, kita akan beli kalau uangnya ada.	
	P	Apakah ada proses penyeleksian vendor dalam pengadaan barang dan jasa?	
	N	Selama ini tidak ada tender. Jadi biasanya kita transaksinya ya beli langsung (pakai kas). Kalau beli ya tinggal beli terus dimintakan ke saya uangnya.	
	P	Apakah di sini ada sistem informasi akuntansi atau manajemen di masjid Rahmat ini?	
	N	Belum ada mas. Itu yang kemarin saya belajar itu yang PSAK 45. Terus sekarang sedang belajar format yang dari mas yoga kemarin itu, yang ISAK 35.	Penulis sebelumnya pernah mengenalkan secara singkat mengenai ISAK 35
	P	Bagaimana bentuk proses keuangan masjid Rahmat ini? Mulai dari penganggaran, penerimaan sampai pengeluaran dananya itu bagaimana pak?	
	N	Kalau penganggaran kita ga ada, cuma kita <i>ancer-ancer</i> misalnya mau ganti aset peralatan kayak komputer ya disiapkan kira-kira berapaukupnya. Kalau kita nyusun sih belum. Jadi sifatnya insidental. Kadang saya yang beli kadang takmir beli tapi ya harus sesuai. Ya kalau ada penerimaan ya kita terima. Kalo ga ada pengeluaran ya kita simpan.	
	P	Kalau proses pemberian gaji atau bisyarah di sini bagaimana pak?	
	N	Kemarin sudah ada tawaran dari Bank BNI untuk payroll tapi payrollnya itu kadang-kadang tersendat. Jadi sementara ini <i>cash</i> langsung dari saya.	
	P	Laporan keuangan yang dibuat bagaimana pak?	
	N	Ya kayak yang kemarin itu. Cuma penerimaan dan pengeluaran. Nah kebetulan saya sekarang jadi bendahara, saya maunya membuat laporan keuangan kayak yang dari mas yoga, yang ISAK 35. Maka dari itu nanti saya nyoba <i>input</i> terus kalo ada kesulitan saya nelpon mas Yoga.	

	P	Siap insyaaAllah pak. Di sini kan ada sekolah pak, itu pelaporannya itu jadi satu dengan sini atau bagaimana pak?	
	N	Kemarin itu setelah dibentuk kepengurusan baru itu ada rencana membentuk lembaga pendidikan tersendiri buat menaungi sekolah-sekolah tersebut. Jadi laporannya nanti yang <i>menghandle</i> lembaga itu. Tapi selama ini ya dipisah.	
	P	Pak di sini apakah ada infak atau donasi elektronik?	
	N	Ada QRIS itu. Dulu itu di kaleng ada scan QRISnya tapi jamaah itu banyak yang belum paham.	
		Apakah Laporan keuangannya sudah diaudit?	
		Belum. Makanya itu kita mau pelajari dulu laporan yang sesuai peraturan itu biar kita bisa buat dan jalankan.	
		Menurut pak Besar, apa yang harus ditingkatkan untuk memperbaiki akuntabilitas masjid Rahmat?	
		SDM. Setidaknya SDM itu harus paham komputer, kan sekarang sudah jamannya komputerisasi. Kalau kita belum bisa sampai itu nanti akan sulit. Saya inginnya ada pelatihan buat pengurus untuk penggunaan komputer. Nah kalau sudah bisa ya kita akan lebih mudah membuat laporannya.	
		Begitu ya pak. Sepertinya cukup segini dulu pak. Maturnuwun sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara.	
		Sama-sama mas. Nanti kalau ada yang kurang ke sini lagi aja. Sekalian bantu saya belajar <i>nyusun</i> laporan keuangan yang sesuai ISAK 35.	
		Siap, baik Pak. Assalamu'alaikum.	
		Wa'alaikumsalam.	

Transkrip Wawancara

Nama Lengkap : Priadi

Jabatan : Staff Kantor Masjid Rahmat Surabaya

Tempat : Ruang Kantor Sekretariat Masjid Rahmat Surabaya

Tanggal : Selasa, 5 April 2022

Waktu : 10.02 WIB

Keterangan : P (Peneliti), N (Narasumber)

1	P	Assalamualaikum Pak. Saya Yoga dari Unair mau wawancara untuk penelitian saya. Ini dengan Pak Jaok <i>nggih</i> ?	
	N	Iya benar mas. Jaok itu panggilan saya nama aslinya Priadi.	
	P	Oh iya pak. Ini saya memanggilnya Pak Jaok atau Pak Priadi <i>nggih</i> pak?	
	N	Pak Jaok saja mas, sudah terbiasa begitu.	
	P	Iya baik pak. Pak kalau boleh tahu Pak Jaok di sini kerja sudah berapa lama ya?	
	N	Saya di sini antara 25 sampai 30 tahunan. Waktu masih muda sekitar usia 20 tahunan	
	P	Di sini Pak Jaok di bagian apa pak?	
	N	Kalau dulu yang bagian bantu-bantu bagian serabutan. Kemudian ada pergantian pengurus dan petugas kantor sini ada yang meninggal, akhirnya kami di tempatkan di sini. Istilahnya di sini staff kantor lah.	
	P	Sebagai staff kantor di sini tugasnya apa saja pak?	
	N	Kami memang dari awal membantu pelayanan kemasjidan seperti mengurus jadwal khotib jumat, pengajian-pengajian muslimat, sholat idul fitri dan idul adha serta juga menerima amanah dari jamaah sifatnya itu donasi lalu kamu berikan ke pak Besar (Bendahara). Selain itu, jika ada pengeluaran kecil kami catat dan juga laporkan ke bendahara.	Sering menggunakan kata “kami” untuk merujuk diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mendahulukan masjid daripada personalitas beliau.
	P	Motivasi pak Jaok untuk bekerja di sini?	

	N	Kami kan dulu sifatnya jamaah terus sering bantu-bantu di sini. Niatnya di sini ibadah, memuliakan rumah Allah. Prinsip saya itu jika kita memuliakan rumah Allah insyaaAllah kita akan dimuliakan oleh Allah.	
	P	Bagaimana pak Jaok menghayati nilai-nilai keislaman dan menerapkannya di masjid?	
	N	Karena kami bukan dari ahli agama, kami cuma bisa memberikan yang terbaik bagi kita dan jamaah. Jadi kami tidak bisa memberikan dakwah dengan dalil agama ke jamaah. Kami berusaha menampilkan akhlak terbaik kepada satu sama lain.	
	P	Apakah di sini ada hukuman pada pengurus yang berlaku salah?	
	N	Kita di sini biasanya kalau ada yang kurang pas saling menegur tapi kami menganggapnya itu lebih ke nasehat daripada teguran sih mas.	
	P	Kalau penghargaan atau <i>reward</i> begitu apa ada pak?	
	N	Untuk piagam penghargaan itu tidak ada cuma memberikan motivasi. Cuma barangkali istilahnya itu purnatugas buat pengurus sudah mengabdikan beberapa tahun dan keluar. Dari pengurus memberikan tali asih sesuai dengan kemampuan pengurus.	
	P	Selama 25 sampai 30 tahun pak Jaok di sini pernah ada kasus hukum? Atau ada kehilangan uang masjid?	
	N	InsyaaAllah selama ini tidak ada. Kalau itu relatif juga, kami sendiri kurang tahu persis juga tapi selama kami itu lewat kami insyaaAllah tidak ada istilahnya uang hilang.	
	P	Sistem perekrutannya di sini itu bagaimana nggih pak?	
	N	Ya itu sifatnya kayak alami begitu. kami itu jamaah, istilahnya pengabdian, terus sering ikut bantu kegiatan-kegiatan dari kecil sampai dewasa. Akhirnya, tidak ada perekrutan, istilahnya ngawula, mengabdikan, jadi intinya kita istikamah di sini lama-lama ditunjuk sebagai pengurus. Kalau pengurus lain, kami kurang terlalu paham juga tapi komposisinya banyak dari warga kembang kuning sekitar sini.	

	P	Apa di sini ada program pelatihan buat pengurus, apalagi bapak di sini juga pegang uang yayasan juga?	
	N	Memang sementara belum ada program pelatihan. Jadi kami belajar sedikit-sedikit dari pak Besar tapi masih tidak terlalu lihai, jadi pembukuan dari kami secara manual. Lalu kami fotokopi dan kami berikan pak Besar.	
	P	Apa di sini ada SOP buat pengurus-pengurus di sini pak?	
	N	Memang kami tidak ada standarnya dalam menjalankan amanah. Yang penting dan yang terbaik adalah kita mempermudah urusan orang lain tapi jika ada yang kami rasa tidak sesuai dengan kemampuan kami maka kami minta surat tugas atau surat mandat yang jelas.	
	P	Beberapa waktu lalu saya sempat wawancara dengan pak Besar, beliau bilang ada kas kecil yang serahkan ke Pak Jaok. Nah itu peruntukkannya bagaimana pak?	
	N	Kami memang menerima dari pak Besar tapi selain itu juga jika ada dari para jamaah dan muslim-muslimat yang mau bersodakoh jariyah kami juga akan menerima. Lalu kami bukukan di buku kuitansi tiap bulan dan laporkan ke Bendahara.	
	P	Kalau pengeluarannya apa juga begitu Pak?	
	N	Kalau pengeluarannya kami cuma sebagian mas. Semuanya kan dari bendahara juga. Kami cuma paling yang nilainya ga terlalu tinggi. InsyaaAllah kami bisa keluarkan sesuai dari kas dari bendahara dan sebagian kami bagikan ke orang yang istilahnya membutuhkan.	
	P	Untuk penggajian di sini lewat pak Jaok atau bendahara pak?	
	N	Buat gaji teman-teman pengurus lain itu lewat kami. Kami sifatnya sebagai kasir sementara. Jadi kami rekap absennya pengurus lalu kami laporkan ke pak Besar perlunya berapa lalu setelah dapat dana dari pak Besar, kami yang salurkan ke para pengurus.	
	P	Untuk pembiayaan kegiatan itu lewat pak Jaok atau pak Besar?	
	N	Untuk kegiatan kami seringnya dari pak Besar. Kalau yang nominalnya tinggi dari beliau semua.	

		Kalau yang kecil-kecil seperti fotokopi dan lain-lain kami yang mengeluarkan dananya yaitu dari kas kecil cadangan itu tadi.	
	P	Apakah kas kecil itu dianggarkan?	
	N	Kami menyesuaikan pembukuan kami. Katakan ada pemasukan sekian juta, nanti sebagian masuk dilaporkan ke pihak yayasan, dan sebagian dianggarkan sekian juta tapi jumlahnya tidak spesifik mas.	
	P	Bentuk laporan keuangan yang dibuat pak Jaok itu bagaimana pak?	
	N	Sebetulnya kami cuma memberikan catatan manual yang dari kami sendiri ya yang berupa pengeluaran kecil dan sedekah dari jamaah. Kemudian kami fotokopi dan kami berikan ke pak Besar.	
	P	O iya Pak tadi saya tanya pak Haji Riduwan, ada bendahara lain selain pak Besar yang namanya pak Sulis itu apakah di sini juga pak?	
	N	Kan baru saja pergantian pengurus, barangkali jadi kami belum hafal. Belum pernah bertemu juga. Setahu kami, saat ini yang mengurus keuangan itu cuma kami sama pak Besar.	
	P	Oh seperti itu ya pak. Sepertinya cukup ini dulu pak wawancara. <i>Maturnuwun</i> sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara.	
	N	Sama-sama mas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi langsung ke kantor saja mas. InsyaaAllah saya hampir setiap hari di kantor.	
	P	Siap, baik Pak. Assalamu'alaikum.	
	N	Wa'alaikumsalam.	

Lampiran 2: Laporan Keuangan / Pembukuan oleh Pak Priadi

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MASJID RAHMAT Bulan Maret 2022				
TGL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
01/03.22	Gaji Honorarium Karyawan Yayasan Masjid		34,900,000	
	Gaji Ibu Sariah		1,500,000	
	Santunan Janda Pengurus - Bp. H.Ali Muchsin		500,000	
	Santunan Janda Pengurus - Bp. Darif		500,000	
	Honorarium Bp. Ansor - Imam/Muadzin		750,000	
	Honorarium Bp. Imam Mustofa - Muadzin		500,000	
	Honorarium Bp. Soewono - Petugas		400,000	
	Penarik Sampah Pak Paimo		200,000	
	Infag	2,000,000		
02/03.22	Beli Kran		400,000	
04/03.22	Transport Khotib Jumat		800,000	
	Bilal		150,000	
	Muadzin		125,000	
	Protokol		25,000	
	Kaleng Jumat	7,620,000		
	Parkir	325,000		
	Beli kopi, teh, gula Bp. Subur		70,000	
	Petugas Pak Muchtar		25,000	
	Beli Sapu		20,000	
05/03.22	Kotak Besar	4,120,000		
10/03.22	Bayar Wifi		300,000	
11/03.22	Transport Khotib Jumat		800,000	

Lampiran 3: Laporan Keuangan bagian Neraca

LAPORAN POSISI KEUANGAN					
Kas	58,937,989	(36,298,687)	Utang Usaha Lain-Lain	-	-
BCA	-	-	Uang Jaminan	-	-
BRI	-	-	Pendapatan diterima di Muka	-	-
Bank Mandiri	-	89,960,000	Utang PPN	-	-
Bank 2	-	-	Utang PPH	-	-
Bank 3	-	-	Liabilitas Jangka Panjang		
Bank 4	-	-	Utang Bank 1	-	-
Pengeluaran dibayar di Muka	-	-	Utang Bank 2	-	-
Piutang Pinjaman	-	-	Utang Individu	-	-
Piutang SPP	-	-	Utang Koperasi Lain	-	-
Piutang Pinjaman Karyawan	-	-	Utang Lembaga Keuangan Lain	-	-
Piutang Usaha	-	-	Total Liabilitas	-	-
Piutang Donasi/Sumbangan	-	-			
Aset Tetap			Aset Neto		
Inventaris Kantor	-	-	Tanpa Pembatasan	58,937,989	42,681,313
Inventaris Kendaraan	-	-	Pembatasan	-	20,180,000
Inventaris Elektronik	-	-	Total Aset Neto	58,937,989	62,861,313
Inventaris Tanah dan Bangunan	-	-			
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-	-			
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	-	-			

Lampiran 4: Keputusan Rapat Terkait Susunan Pembina dan Pengurus Masjid Rahmat

Rapat dimulai pada pukul 19.30 WIB. dan dibuka oleh Sekretaris Rapat, : Muhammad Riduwan, SAG selanjutnya rapat dipimpin oleh Anis Busroni selaku Pembina Yayasan Masjid Rahmat ;

Rapat diadakan dengan tujuan :

1. Mengisi keanggotaan Pembina Yayasan dikarenakan adanya Ketua dan Anggota Pembina yang meninggal dunia, yakni : H. Moch. Ali Muchsin (Ketua Pembina) dan H. Abdul Syukur Asnan (Anggota Pembina) ;
2. Menetapkan susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Masjid Rahmat dikarenakan telah habis masa kepengurusannya ;

Setelah rapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah disampaikan dan diambil keputusan secara musyawarah mufakat, dan sudah tidak ada lagi yang dibahas dalam rapat tersebut maka rapat ditutup pada pukul 20.30 WIB.

Dari hasil keputusan Rapat tersebut ditetapkan Pembina dan Pengurus serta Pengawas Yayasan Masjid Rahmat sebagai berikut :

I. Pembina :

K. H. Agoes Ali Masyhuri	: Ketua
K. H. Mas Sulaiman	: Anggota
Anis Busroni	: Anggota
Achmad Murtafi Haris	: Anggota
Drs. Ahmad Syauqi	: Anggota

II. Pengurus :

K. H. Abdul Muchit Moertadlo	: Ketua Umum
Agus Hilmi	: Ketua I
Roliyono	: Ketua II
Muhammad Riduwan, SAG.	: Sekretaris Umum
M. Samsul Hadi	: Sekretaris
Besar Suripno, S.H.	: Bendahara Umum
Widji Sulistiono	: Bendahara



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031)5026288
Laman : <http://feb.unair.ac.id> e-mail : info@feb.unair.ac.id, humas@feb.unair.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 7488 /UN3.1.4/PK.05.00/2022

TES KESAMAAN (*SIMILARITY*)

Setelah melakukan tes uji similarity, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Munir
Nip : 196701261990031001
Jabatan : Kepala Urusan Ruang Baca

Menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : YOGA BATRIAWAN SOTYA
Nim : (041511333026)
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul karya : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
KEAGAMAAN (Studi Kasus Tunggal pada Masjid Rahmat Surabaya)

Paper ID : 1886716585
Class ID : 32913685
Date : 25 Agustus 2022

Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 11 %

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

25 Agustus 2022
a.n.Kasubag.Akademik,
Kaur Ruang Baca,



N
ABDUL MUNIR
NIP 196701261990031001





UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031)5026288
 Laman : <http://feb.unair.ac.id> e-mail : info@feb.unair.ac.id, humas@feb.unair.ac.id

Lampiran:

Feedback Studio - Personal - Microsoft Edge
https://ev.turnitin.com/app/carta/en_us/?o=1996716585&u=101644632&u=35&lang=en-us

feedback studio Yoga Batriawan Sotya AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PAD... /0 2 of 2

11%

1 repository.unair.ac.id 4%
 2 123dok.com 1%
 3 Submitted to iGroup 1%
 4 repository.tradewinter.a... <1%
 5 docplayer.info <1%
 6 digitlibadmin.unismuha... <1%
 7 Jari Dawud, Dendi Fawzi... <1%

Page: 1 of 39 Word Count: 10285 Text-Only Report High Resolution